



AGRO MODERN

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

TAHUN
20
25



BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO 29 PASAR MINGGU, JAKARTA 12540 POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 FAKSIMIL (021) 7806044

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2026

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan

Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan

Kapoksi PPT BRMP Biogen

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN 2025

TIM PENYUSUN:

Tim Penyusun LAKIN BBPM SDLP



**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER
DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BBPM SDLP dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BBPM SDLP disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPM SDLP TA. 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Pada dokumen PK tersebut ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ingin dicapai oleh BBPM SDLP pada TA 2025. Sasaran kinerja tersebut dicapai melalui kerja keras Balai lingkup BBPM SDLP (yakni: BBPM SDLP, BRMP Pertanian Lahan Rawa, BRMP Tanah dan Pupuk, BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, BRMP Lingkungan Pertanian).

Diharapkan Laporan Kinerja BBPM SDLP ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan program. Selain itu menjadi umpan balik guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja lingkup BBPM SDLP selanjutnya.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pelaksana kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, Januari 2026
Kepala Balai Besar,

Asdianto, S.P., M.T.
NIP 197801012002121006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) merupakan salah satu unit kerja di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BBPM SDLP mempunyai tugas untuk melaksanakan perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian (Pasal 16), serta menyelenggarakan fungsi (Pasal 17): (a) Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (b) pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (c) Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (d) pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian; (e) Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian; (f) Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; dan (h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Dalam Rencana Strategis BBPM SDLP 2025-2029, Visi dan Misi BBPM SDLP mengacu pada Visi dan Misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yaitu **“Mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan modern yang inovatif dalam mendukung pertanian maju”**. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai arah dan panduan organisasi, yaitu sebagai berikut: (1) Melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan Pembangunan pertanian nasional; (2) Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani; (3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasa dan perakitan teknologi pertanian terapan; (4) Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasa teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian; dan (5) Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

Kinerja BBPM SDLP tahun 2025 tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen formal berisi komitmen dan kesepakatan antar level pimpinan pada suatu instansi untuk melaksanakan

program/kegiatan dengan target kinerja yang terukur dalam periode tertentu. Berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas, evaluasi dan dasar pemberian penghargaan/sanksi, serta wujud nyata komitmen aparatur untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dokumen ini mencakup sasaran, indikator, dan target yang harus dicapai. Sasaran kinerja BRMPP SDLP tahun 2025 yaitu (1) Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumber daya lahan pertanian; (2) Terwujudnya pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian; (3) Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; (4) Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran kinerja tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yaitu sebagai berikut: IKSK-1 Indeks kepuasan layanan pengujian sumber daya lahan pertanian; IKSK-2 Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian; IKSK-3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian; IKSK-4 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Dalam mengukur capaian kinerja, ditetapkan kriteria penilaian yang terbagi ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu (1) sangat berhasil: > 100%; (2) berhasil: 80 – 100%; (3) cukup berhasil: 60 – 79%; dan (4) tidak berhasil: 0 – 59%.

Capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 dan sekaligus pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) BBPM SDLP periode 2025-2029 sebagai lembaga baru setelah adanya transformasi kelembagaan dari sebelumnya Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP). Pada tahun 2025, BBPM SDLP telah berhasil melaksanakan 4 (empat) sasaran kegiatan yang diukur melalui 4 (empat) IKSK. Capaian IKSK-1 Indeks kepuasan layanan pengujian sumber daya lahan pertanian tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 3,50 atau 109,38% dari target 3,20 menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK-2 Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian tahun 2025 tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. Capaian IKSK-3 Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Balai Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 88,63 atau 106,33% dari target 83,35 menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK-4 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Balai Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 98,08 atau 107,78% dari target 91 menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Dengan demikian, capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 telah mencapai rata-rata persentase sebesar 107,83% atau dengan kategori keberhasilan **Sangat Berhasil**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi.....	1
1.3. Tantangan dan Peran Strategis.....	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis Organisasi.....	6
2.1.1. Visi dan Misi.....	6
2.1.2. Tujuan.....	6
2.1.3. Sasaran Kegiatan.....	7
2.1.4. Kebijakan.....	7
2.1.5. Program dan Kegiatan.....	8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	13
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025.....	17
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Rencana Strategis 2025-2029.....	19
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.....	19
3.1.5. Analisis dan Efisiensi Pengguna Sumberdaya.....	20
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	22
3.2. Capaian Kinerja Lainnya.....	24
3.2.1. Perumusan Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian.....	24
3.2.2. Sistem Informasi Terintegrasi (SISCROP, SIAP TANAMAN, SIFORTUNA).....	26
3.2.3. Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2.....	27

3.2.4. Penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.....	28
3.2.5. BBPM SDLP Ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).....	28
3.2.6. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik.....	29
3.2.7. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015.....	29
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
3.3.1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan.....	31
3.3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	31
3.3.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	32
3.3.4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Hibah.....	33
PENUTUP.....	36
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Program dan Kegiatan BBPM SDLP Tahun 2025.....	8
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Revisi Terakhir....	10
Tabel 3.	Capaian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025.....	12
Tabel 4.	Kategori Tingkat Kualitas Pelayanan Publik.....	14
Tabel 5.	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKSK-1 Tahun 2025.....	14
Tabel 6.	Hasil Penilaian Pembangunan ZI BBPM SDLP Tahun 2025.....	15
Tabel 7.	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKSK-3 Tahun 2025.....	16
Tabel 8.	Perbandingan antara Target dan Realisasi IKSK-4 Tahun 2025.....	17
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Kinerja IKSK-1 Tahun 2023-2025.....	17
Tabel 10.	Perbandingan Capaian Kinerja IKSK-2 Tahun 2023-2025.....	17
Tabel 11.	Perbandingan Capaian Kinerja IKSK-3 Tahun 2023-2025.....	18
Tabel 12.	Perbandingan Capaian Kinerja IKSK-4 Tahun 2023-2025.....	18
Tabel 13.	Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap target Renstra BBPM SDLP Tahun 2025-2029.....	19
Tabel 14.	Kendala dan Alternatif Solusi.....	20
Tabel 15.	Data Penggunaan SBK BBPM SDLP Tahun 2025.....	21
Tabel 16.	Data Efisiensi SBK BBPM SDLP Tahun 2025.....	21
Tabel 17.	Rincian Dokumen RSNI3 yang dihasilkan BBPM SDLP Tahun 2025.....	25
Tabel 18.	Realisasi Anggaran UK/UPT Lingkup BBPM SDLP.....	31
Tabel 19.	Realisasi Anggaran Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2025.....	31
Tabel 20.	Realisasi Anggaran UK/UPT Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jenis Belanja.....	32
Tabel 21.	Target dan Realisasi PNPB UK/UPT Lingkup BBPM SDLP Tahun 2025.....	33
Tabel 22.	Pagu dan Realisasi Anggaran Hibah Lingkup BBPM SDLP	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Keragaam Jumlah Pegawai di UK/UPT Lingkup BBPM SDLP	3
Gambar 2.	Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.....	22
Gambar 3.	Dokumentasi RSNI3 yang dihasilkan UK/UPT Lingkup BBPM SDLP Tahun 2025.....	26
Gambar 4.	Dokumentasi Integrasi Sistem Informasi.....	27
Gambar 5.	Dokumentasi Ranfkaian Kegiatan Proyek RBP REDD+	27
Gambar 6.	Dokumentasi Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.....	28
Gambar 7.	Dokumentasi Sertifikat Akreditasi Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk.....	28
Gambar 8.	Dokumentasi Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2025	29
Gambar 9.	Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015.....	29
Gambar 10.	Data Anggaran Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan DIPA Revisi Terakhir.....	30
Gambar 11.	Dokumentasi Kegiatan Hibah <i>Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping Systems in Coastal Indonesia</i>	34
Gambar 12.	Dokumentasi Kegiatan Survei Tanah pada Hibah <i>National Soil Information System to Support The Transformation of Agrifood System In AFACI Countries</i>	34
Gambar 13.	Dokumentasi Kegiatan Hibah <i>Indonesia Testbed Project The Korea Agriculture Technology Promotion Agency (KoAT)</i>	35
Gambar 14.	Dokumentasi Kegiatan Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi BBPM SDLP Tahun 2025.....	38
Lampiran 2.	Struktur Organisasi Lingkup BBPM SDLP	38
Lampiran 3.	Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Lampiran 4.	Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jenis Pegawai.....	39
Lampiran 5.	Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Lampiran 6.	Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	40
Lampiran 7.	Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Awal	44
Lampiran 8.	Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Revisi Ke-1.....	45
Lampiran 9.	Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Revisi Terakhir	47
Lampiran 10.	Manual IKU BBPM SDLP Tahun 2025.....	49
Lampiran 11.	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).....	54
Lampiran 12.	SK Tim Penyusun LAKIN BBPM SDLP 2025.....	55
Lampiran 13.	SK Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM Lingkup BRMP.....	59
Lampiran 14.	SOP Penyusunan Laporan Kinerja BBPM SDLP.....	66
Lampiran 15.	Rencana Aksi UK/UPT Lingkup BBPM SDLP.....	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian tanggal 8 November 2024 adalah unit eselon I Kementerian Pertanian. BRMP merupakan organisasi hasil dari transformasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) tahun 2022-2024 dan sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (BALITBANGTAN) tahun 1974-2022. BRMP hadir menjadi tonggak penting dalam reformasi kelembagaan sektor pertanian yang mengedepankan inovasi dan modernisasi, dengan mandat strategis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, penyebarluasan, dan penerapan pertanian modern.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) merupakan unit eselon IIB dibawah BRMP. Akibat adanya transformasi kelembagaan di BRMP menjadikan unit kerja dibawahnya ikut bertransformasi, termasuk BBPM SDLP yang semula Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP).

Rencana kegiatan BBPM SDLP Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung BRMP dan Kementerian Pertanian, sebagai langkah dasar yaitu dengan menyusun perencanaan yang memuat strategi dan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu, dimana telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) BBPM SDLP Periode 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, Renstra Kementerian Pertanian Periode 2025-2029, dan Draft Renstra BRMP Periode 2025-2029. Selanjutnya Renstra BBPM SDLP Periode 2025-2029 akan dijadikan pedoman dan acuan dalam perencanaan serta pelaksanaan perakitan dan modernisasi pertanian dibidang sumber daya lahan pertanian.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan, sehingga diperlukan pengukuran kinerja yang tertuang dalam bentuk laporan pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang telah dipercayakan, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBPM SDLP untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam penyusunan laporan kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, SOP Penyusunan Laporan Kinerja BBPM SDLP (Lampiran 14), dan Surat Keputusan Kepala BBPM SDLP tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 (Lampiran 12).

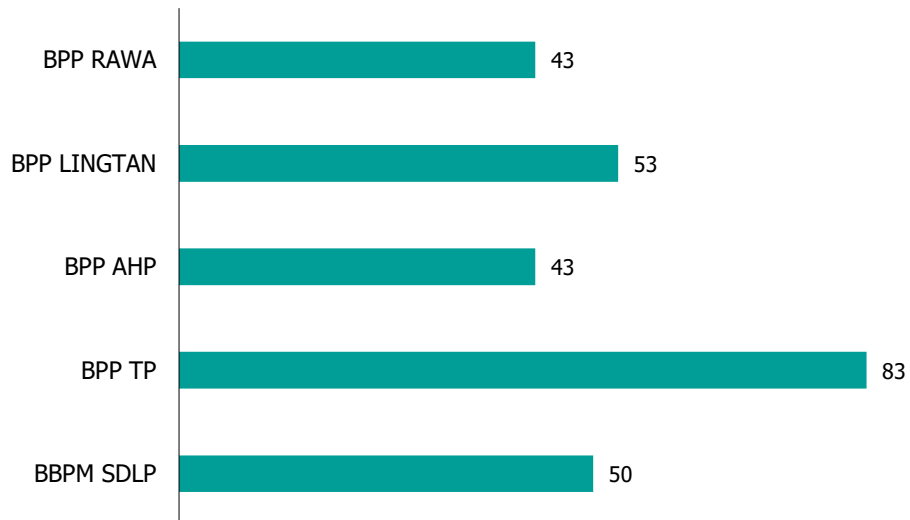
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BBPM SDLP mempunyai tugas untuk melaksanakan

perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian (Pasal 16), serta menyelenggarakan fungsi (Pasal 17): (a) Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (b) pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (c) Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (d) pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian; (e) Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian; (f) Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; (g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; dan (h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BBPM SDLP dipimpin oleh Kepala Balai Besar dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha (tertuang didalam struktur organisasi internal BBPM SDLP yang tersaji pada Lampiran 1). BBPM SDLP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah koordinasinya antara lain Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (BPP TP), Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BPP AHP), Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (BPP LINGTAN), dan Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa (BPP RAWA). Oleh karena itu BBPM SDLP juga memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lintas sumber daya dari UPT yang berada dibawahnya koordinasinya (struktur organisasi lingkup BBPM SDLP yang tersaji pada Lampiran 2).

Berdasarkan data per Desember 2025, BBPM SDLP dan UPT dibawah koordinasinya didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 272 orang, terdiri dari 155 orang laki-laki dan 122 orang perempuan (tersaji pada Lampiran 3), dengan rincian pegawai di BBPM SDLP sebanyak 50 orang; BPP TP sebanyak 83 orang; BPP AHP sebanyak 43 orang; BPP LINGTAN sebanyak 53 orang; dan BPP RAWA sebanyak 43, data tersaji pada Gambar 1. Pegawai lingkup BBPM SDLP terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) (tersaji pada Lampiran 4). Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai lingkup BBPM SDLP terdiri dari 14 orang S3, 51 orang S2, 78 orang S1/D4, 40 orang D3, 85 orang SLTA, 1 orang SLTP, dan 3 orang SD (tersaji pada Lampiran 5). Kemudian berdasarkan komposisi jabatan pegawai lingkup BBPM SDLP terdiri atas 10 orang struktural, 106 orang pelaksana/jabatan fungsional umum, dan 156 orang jabatan fungsional tertentu (tersaji pada Lampiran 6).



Gambar 1. Keragaan Jumlah Pegawai di UK/UPT Lingkup BBPM SDLP

Sarana dan prasarana yang dimiliki satuan kerja lingkup BBPM SDLP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain Laboratorium, Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP), *Agriculture War Room* (AWR), *Smart Farming* (*green house* dan *indoor vertical farming*) dan lain sebagainya. Laboratorium yang dimiliki oleh satuan kerja lingkup BBPM SDLP antara lain:

- Laboratorium GIS (*Geographic Information System*) di Bogor, Jawa Barat (Dibawah Koordinasi BBPM SDLP)
- Laboratorium Terpadu di Loktabat Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan (Dibawah koordinasi BPP RAWA);
- Laboratorium Biologi dan Kesehatan Tanah di Bogor, Jawa Barat (dibawah koordinasi BPP TP);
- Laboratorium Fisika Tanah di Bogor, Jawa Barat (dibawah koordinasi BPP TP);
- Laboratorium Mineralogi Tanah di Bogor, Jawa Barat (dibawah koordinasi BPP TP);
- Laboratorium Kimia Tanah di Bogor, Jawa Barat (dibawah koordinasi BPP TP);
- Laboratorium AgroHidromet di Bogor, Jawa Barat (dibawah koordinasi BPP AHP);
- Laboratorium Gas Rumah Kaca di Jakenan, Pati, Jawa Tengah (dibawah koordinasi BPP LINGTAN);
- Laboratorium Residu Bahan Agrokimia di Laladon, Bogor (dibawah koordinasi BPP LINGTAN);

Kemudian IP2MP yang dimiliki oleh satuan kerja lingkup BBPM SDLP antara lain:

- a. IP2MP Taman Bogo, Kabupaten Lampung (dibawah koordinasi BPP TP);
- b. IP2MP Jakenan, Kabupaten Pati (dibawah koordinasi BPP LINGTAN);
- c. IP2MP Banjarbaru, kota Banjarbaru (dibawah koordinasi BPP RAWA);
- d. IP2MP Balandean, Kabupaten Barito Kuala (dibawah koordinasi BPP RAWA);
- e. IP2MP Binuang, Kabupaten Tapin (dibawah koordinasi BPP RAWA);
- f. IP2MP Handil Manarap, Kabupaten Banjar (dibawah koordinasi BPP RAWA);
- g. IP2MP Tanggul, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (dibawah koordinasi BBPP RAWA);
- h. IP2MP Tawar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (dibawah koordinasi BPP RAWA);

1.3. Tantangan dan Peran Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, dimana terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan; Intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan; Rencana kerja di tiap instansi pemerintah; hingga Penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.

Dari kedelapan Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Pertanian memiliki kontribusi pada Prioritas Nasional ke-2 yakni: "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru".

Terciptanya Prioritas Nasional mengenai swasembada pangan sangat dibutuhkan dengan melihat situasi pangan global saat ini yang dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks diantaranya meliputi perubahan iklim, pertumbuhan populasi global yang pesat, serta meningkatnya ketegangan geopolitik dan perang dagang antar negara. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, ditandai dengan penurunan produktivitas, perubahan pola tanam, serta meningkatnya risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian, terbatasnya sumber daya air dan mengganggu rantai pasok pangan global.

Pertumbuhan populasi dunia terus meningkat mendorong lonjakan kebutuhan pangan secara global. Lonjakan tersebut tercermin dari meningkatnya permintaan pangan pokok seperti beras, gandum, dan jagung. Permintaan terhadap komoditas tersebut diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam dekade mendatang. Kondisi ini berpotensi semakin kompleks dengan adanya ketegangan geopolitik dan perang dagang yang menyebabkan guncangan signifikan terhadap rantai pasok global serta mendorong peningkatan harga berbagai komoditas pertanian. Perkembangan situasi pangan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, menyebabkan Indonesia perlu

mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari dampak buruk dari potensi krisis pangan global.

Ketahanan pangan nasional merupakan pilar strategis dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan pembangunan negara. Pemenuhan kebutuhan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat tidak hanya mencerminkan keberhasilan sektor pertanian, tetapi juga berperan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Ketahanan pangan yang kokoh memperkuat posisi negara dalam menghadapi tekanan global, menjaga kestabilan harga, serta melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari risiko krisis. Dalam perspektif jangka panjang, ketahanan pangan adalah elemen mendasar untuk mewujudkan pembangunan nasional yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.

Swasembada pangan sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan menunjukkan kemampuan bangsa dalam memanfaatkan potensi domestik secara maksimal, mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan, serta membuka peluang kerja yang berkelanjutan. Mewujudkan swasembada pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional merupakan fondasi utama bagi kedaulatan dan keberlanjutan pembangunan negara yang inklusif dan berdaulat.

Dalam rangka mendukung prioritas tersebut Kementerian Pertanian membangun rumah strategi dengan delapan pilar. Salah satu pilar yang menjadi penopang utama dengan tugas dan fungsi BRMP adalah Pilar ke-6 yakni "Pemanfaatan teknologi pertanian modern" (tersaji pada Lampiran 7). Pemanfaatan teknologi pertanian modern merupakan proses penerapan inovasi dan peralatan modern dalam aktivitas pertanian untuk meningkatkan efiseinsi, produktivitas mutu hasil, dan keberlanjutan usaha tani. Teknologi modern ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pra-tanam, budidaya, panen, hingga pascapanen.

BBPM SDLP dan UPT dibawah koordinasinya memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan disektor pertanian untuk mendukung program prioritas tersebut. Hal ini didukung oleh tugas dan fungsi Informasi Geospasial Tematik (IGT) pertanian yang diemban oleh BBPM SDLP yaitu sebagai walidata IGT Pertanian khususnya terkait sumber daya lahan; Penyedia peta tematik seperti Peta Jenis Tanah, Peta Lahan Gambut, dan peta tematik lainnya untuk mendukung kebijakan pemerintah; Pengembangan *Indonesian Soils and Agroclimate Information System* (INA SOIL AGRO); Analisis kesesuaian lahan untuk menilai potensi, mengevaluasi lahan berbagai komoditas pertanian, serta identifikasi area pontensial atau subur; Dukungan sistem informasi modern melalui SISCrop 2.0 yang menyajikan data berbasis spasial untuk estimasi luas tanam, panen, dan provitas padi; Sistem Informasi SIAP TANAM yang menyajikan data perencanaan awal tanam berdasarkan analisis klimatologi dan neraca air; Rekomendasi pemupukan berimbang; Pengukuran Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan Pengelolaan lahan rawa. Singkatnya BBPM SDLP mengintegrasikan teknologi modern dengan data spasial (IGT) untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertanian. Sehingga dapat disimpulkan BBPM SDLP memiliki peran strategis dalam pemanfaatan teknologi modern.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (periode 5 tahunan) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Renstra Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 yang telah tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025, dan Renstra Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra BBPM SDLP akan dijadikan pedoman dan acuan dalam merencanakan serta melaksanakan perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis, baik di dalam maupun antar subsektor terkait.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) mengacu pada Visi dan Misi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), yaitu **"Mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan modern yang inovatif dalam mendukung pertanian maju"**. Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan Misi sebagai arah dan panduan organisasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan Pembangunan pertanian nasional;
- 2) Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
- 3) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
- 4) Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
- 5) Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

2.1.2. Tujuan

Tujuan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) adalah mewujudkan tersedianya teknologi, model, perakitan, modernisasi serta standar sumber daya lahan pertanian yang adaptif lokasi, berkelanjutan, dan berdaya saing, guna mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan ketahanan sistem pertanian nasional. Untuk mendukung tujuan tersebut maka yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Menghasilkan hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik agroekosistem wilayah;

- 2) Mendorong penerapan inovasi dan teknologi pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan.
- 3) Mendukung penyusunan, pengujian, dan penerapan standar instrumen serta model pengelolaan sumber daya lahan pertanian;
- 4) Meningkatkan pemanfaatan hasil perakitan dan modernisasi dalam mendukung kebijakan pembangunan pertanian;
- 5) Memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan diseminasi teknologi sumber daya lahan pertanian;
- 6) Memperkuat kelembagaan internal dengan adanya dukungan manajemen yang solid dan penganggaran yang optimal.

2.1.3. Sasaran kegiatan

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025, memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu:

- 1) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian sumber daya lahan pertanian, diukur dengan IKSK yaitu Indeks kepuasan layanan pengujian sumber daya lahan pertanian
- 2) Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian, diukur dengan IKSK yaitu Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian
- 3) Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, diukur dengan IKSK yaitu Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
- 4) Sasaran Kegiatan 4: Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, diukur dengan IKSK yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

2.1.4. Kebijakan

Arah kebijakan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) tahun 2025-2029 difokuskan pada penguatan peran lembaga sebagai pusat perakitan, pengujian, dan modernisasi sumber daya lahan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, berkelanjutan, dan berbasis standar. Kebijakan ini mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian secara efisien, ramah lingkungan, dan berbasis inovasi teknologi. Secara umum, arah kebijakan BBPM SDLP antara lain:

- 1) Penguatan perakitan dan modernisasi teknologi pengelolaan sumber daya lahan pertanian;
- 2) Peningkatan penerapan standar dan instrumen sumber daya lahan serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan;
- 3) Penguatan dukungan teknis dan rekomendasi kebijakan berbasis hasil perakitan dan pengujian;

- 4) Pengembangan kelembagaan, SDM, dan tata Kelola yang professional, akuntabel, dan adaptif;
- 5) Peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pusat dan daerah.

2.1.5. Program dan Kegiatan

Tabel 1. Program dan Kegiatan BBPM SDLP Tahun 2025

Program	Komponen/Sub Komponen	Volume
018.09.EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
7911.BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	7911.BJA. 107 Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	3 Produk
	7911.BJA.107.051 Pengujian Instrumen Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dan Pupuk	
	7911.CAG.104 Sarana Laboratorium SDLP Modern	7 Unit
	7911.CAG.104.051 Alat Laboratorium Sumber Daya Lahan Pertanian	
018.09.WA Program Dukungan Manajemen		
6918.AEA Koordinasi	6918.AEA.101 Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1 Kegiatan
	6918.AEA.101.051 Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	
6918.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6918.EBA.956 Layanan BMN	1 Layanan
	6918.EBA.956.051 Pelaksanaan dan Pengelolaan BMN	
	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan
	6918.EBA.958.051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	
	6918.EBA.962 Layanan Umum	1 Layanan
	6918.EBA.962.051 Layanan Kerumahaan dan Umum	
	6918.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan
	6918.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	
	6918.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
	6918.EBD.953.051 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen formal berisi komitmen dan kesepakatan antar level pimpinan pada suatu instansi untuk melaksanakan program/kegiatan dengan target kinerja yang terukur dalam periode tertentu. Berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas, evaluasi dan dasar pemberian

panghargaan/sanksi, serta wujud nyata komitmen aparaturnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dokumen ini mencakup sasaran, indikator, dan target yang harus dicapai, serta menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan PK BBPM SDLP tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra BBPM SDLP periode 2025-2029. Dimana sasaran kinerja telah diselaraskan dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) serta Kementerian Pertanian. Dokumen PK BBPM SDLP tahun 2025 telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan dan revisi anggaran BBPM SDLP, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **PK awal:** ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan dan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), antara lain yaitu (1) Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan didukung oleh IKSK-1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan, pada Sasaran Kegiatan 1 dan IKSK-1 tidak terdapat target; (2) Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan didukung oleh IKSK-2: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, dengan target nilai sebesar 83,35; dan (3) Sasaran Kegiatan 3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan didukung oleh IKSK-3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian, dengan target nilai SMART sebesar 87. Ketercapaian sasaran kegiatan pada PK awal didukung oleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp 11.656.781.000,-. Dokumen PK awal BBPM SDLP tahun 2025 disajikan pada Lampiran 7.
- 2) **PK Revisi Ke-1:** ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2025, telah terjadi transformasi kelembagaan yang semula Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. Hal tersebut menjadikan perubahan redaksional dan perubahan pada sasaran kegiatan 1 dan IKSK-1 yang semula sasaran kegiatan 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian dengan IKSK-1: Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan, direvisi menjadi sasaran kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Produk Sumber Daya Lahan Pertanian dengan IKSK-1: Persentase Produk Sumber Daya Lahan Pertanian yang Tersertifikasi dengan target sebesar 100%. Kemudian terjadi revisi juga pada IKSK-3 yang semula sasaran kegiatan 3: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan IKSK-3: Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian, direvisi menjadi sasaran kegiatan 3: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan IKSK-3: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan target nilai sebesar 87, diikuti juga dengan perubahan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar RP

12.791.241.000,-. Dokumen PK revisi ke-1 BBPM SDLP tahun 2025 disajikan pada Lampiran 8.

- 3) **PK Revisi Ke-3:** ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2025, telah terjadi penambahan jumlah sasaran kegiatan dan IKS yang semula 3 (tiga) menjadi 4 (empat), dengan adanya perubahan sasaran kegiatan 1 dan IKS-1 yang semula sasaran kegiatan 1: Meningkatnya Kualitas Produk Sumber Daya Lahan Pertanian dengan IKS-1: Persentase Produk Sumber Daya Lahan Pertanian yang Tersertifikasi, direvisi menjadi sasaran kegiatan 1: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian dengan IKS-1: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian dengan target indeks sebesar 3,20. Kemudian terdapat penambahan sasaran kegiatan dan IKS yang menduduki posisi nomor dua sehingga menggeser posisi sasaran kegiatan dan IKS dibawahnya, yaitu sasaran kegiatan 2: Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan IKS-2: Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian pada sasaran kegiatan 2 dan IKS-2 tidak terdapat target. Kemudian terjadi revisi target pada sasaran kegiatan 4: Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan IKS-4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, dengan target semula 87 direvisi menjadi 91. Selanjutnya revisi alokasi pagu anggaran menjadi Rp 13.377.417.000,-. Dokumen PK revisi terakhir BBPM SDLP tahun 2025 disajikan pada Lampiran 9.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Revisi Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
UTAMA				
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	3,20 (Indeks)	Indeks (1-4)
2	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1. Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	-	Indeks (1-100)
LAINNYA				
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	83,35 (Nilai)	Nilai (1-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	91 (Nilai)	Nilai (1-100)
Pagu Anggaran			Rp 13.377.417.000,-	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 merujuk pada pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 serta Rencana Strategis BBPM SDLP periode 2025-2029. Dimana terdapat 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang akan dicapai dengan didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Pengukuran capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada setiap IKSK, yang kemudian dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut akan menghasilkan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Keberhasilan pencapaian IKSK BBPM SDLP tahun 2025 diukur dengan menggunakan polarisasi maximize target mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKSK BBPM SDLP antara lain (1) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian; (2) Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian; (3) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian; dan (4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Kemudian dalam menentukan perhitungan capaian pada setiap IKSK yaitu dengan merujuk pada Manual Indikator Kinerja Utama (Lampiran 10), dengan formula sebagai berikut:

- 1) IKSK-1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian
Capaian IKSK-1 dihitung dengan melakukan survei kepuasan layanan pengujian sumber daya lahan pertanian menggunakan kuesioner secara online kepada seluruh pengguna layanan. Kemudian dilakukan pengumpulan data hasil survey, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dan perhitungan indeks kepuasan menggunakan Skala Likert 1-4.
- 2) IKSK-2 Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian
Capaian IKSK-2 dihitung dengan membandingkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan dengan jumlah teknologi yang dihasilkan. Namun pada tahun 2025 untuk IKSK ini tidak dapat diukur ketercapaiannya karena tidak terdapat target, sebab tidak adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian pada IKSK tersebut.

- 3) IKSK-3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Penilaian pada IKSK-3 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 Tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Lingkup BRMP Tahun 2025.
- 4) IKSK-4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Pada IKSK-4 Nilai IKPA dihitung secara otomatis dan dipublikasikan pada aplikasi online (OM-SPAN).

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2025 terbagi ke dalam 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil: > 100% (dinormalisasikan maksimal 120%) ; (2) berhasil: 80 – 100%; (3) cukup berhasil: 60 – 79%; dan (4) tidak berhasil: 0 – 59%. Capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks	3,20	3,50	109,38
2	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	-	-	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	83,35	88,63	106,33
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	91	98,08	107,78
Rata-Rata Capaian Kinerja						107,83

Berdasarkan hasil perbandingan antara target dan realisasi IKSK diperoleh persentase capaian untuk IKSK-1 sebesar 109,38%; IKSK-2 tidak terdapat target sehingga tidak ada capaian; IKSK-3 sebesar 106,33%; dan IKSK-

4 sebesar 107,78%. Kemudian hasil persentase capaian dari seluruh IKSK dilakukan perhitungan rata-rata persentase capaian kinerja dan dihasilkan nilai rata-rata kinerja BBPM SDLP tahun 2025 sebesar **107,83%** atau dengan kategori keberhasilan adalah **Sangat Berhasil**.

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian
INDIKATOR KINERJA (IKSK) 1	
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	

Pada IKSK-1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian, BBPM SDLP mempunyai target capaian indeks sebesar 3,20 sesuai dengan yang tertera pada dokumen Perjanjian Kinerja. Target indeks kepuasan layanan pengujian sumber daya lahan pertanian ini dicapai dengan melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan kuesioner secara online kepada seluruh pengguna layanan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang pernah berinteraksi dengan Unit Pelayanan Publik BBPM SDLP. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BBPM SDLP yaitu:

- 1) **Persyaratan**, adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
- 3) **Waktu Penyelesaian**, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) **Biaya/Tarif**, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) **Kompetensi Pelaksana**, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
- 7) **Perilaku Pelaksana**, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) **Sarana dan Prasarana**, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

- 9) **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), sesuai dengan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Tingkat kualitas pelayanan publik dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, dengan rincian tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Tingkat Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan akumulasi perhitungan jumlah responden selama triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 tahun 2025, terdapat sebanyak 48 responden penerima layanan pengujian sumber daya lahan pertanian yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap 9 unsur pelayanan yang tersebut diatas untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna serta menilai kinerja layanan secara menyeluruh.

Hasil perhitungan SKM diperoleh indeks kepuasan layanan sebesar 3,50 atau kategori **(Baik)**, dengan target indeks pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 1 sebesar 3,20. Maka dapat dinyatakan bahwa capaian target telah terpenuhi dan bahkan melebihi, dengan selisih indeks sebesar 0,30. Rincian perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk IKSK-1 tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan antara Target dan Realisasi IKSK-1 Tahun 2025

No	IKSK-1	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks	3,20	3,50	109,38

Sasaran Kegiatan 2	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian
INDIKATOR KINERJA (IKSK) 2	
Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, untuk IKSK-2 yaitu Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian tidak terdapat target capaian, hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian pada IKSK tersebut. Sehingga untuk IKSK ini tidak dapat dilakukan perbandingan antara target dan realisasi.

Sasaran Kegiatan 3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
INDIKATOR KINERJA (IKSK) 3	
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian	

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah, Pembangunan ZI mencakup komponen pengungkit dan komponen hasil. Pada komponen pengungkit terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform, dimana pada setiap aspeknya terdapat area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian pada komponen hasil terdiri dari aspek birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan aspek pelayanan publik yang prima.

Nilai Pembangunan ZI BBPM SDLP diperoleh melalui penilaian mandiri pembangunan ZI Lingkup BRMP, dengan berpedoman pada Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021. Hasil dari penilaian mandiri pembangunan ZI Lingkup BRMP, telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 Tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Lingkup BRMP Tahun 2025 (Lampiran 10), BBPM SDLP memperoleh nilai ZI sebesar 88,60. Rincian mengenai hasil nilai Pembangunan ZI BBPM SDLP disajikan pada Tabel 6, dan perbandingan antara target dan realisasi IKSK-3 BBPM SDLP disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Hasil Penilaian Pembangunan ZI BBPM SDLP Tahun 2025

Penilaian			Bobot	Nilai
A. PENGUNGKIT				
	I. PEMENUHAN			
	1	Manajemen Perubahan	4,00	3,14
	2	Penataan Tata Laksana	3,50	2,50
	3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,48
	4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,74
	5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,13
	II. REFORM			
	1	Manajemen Perubahan	4,00	4,00
	2	Penataan Tata Laksana	3,50	2,59
	3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,25
	4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,51
	5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88
	6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,59
TOTAL PENGUNGKIT			60,00	52,66
B. HASIL				
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			
	a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	15,93
	b.	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00

II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA				
	a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	15,05
TOTAL HASIL			40,00	35,98
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			88,63	

Tabel 7. Perbandingan antara Target dan Realisasi IKS-3 Tahun 2025

No	IKSK-3	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian	Nilai	83,35	88,63	106,33

Sasaran Kegiatan 4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
INDIKATOR KINERJA (IKSK) 4	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian	

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendaara Umum Negara (BUN) untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu, Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%). Dasar hukum penggunaan IKPA di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Tujuan dari penggunaan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKK/LKPP).

Pada akhir Desember 2025, berdasarkan Aplikasi OM SPAN-MONEVPA, nilai IKPA BBPM SDLP per Desember 2025 sebesar 98,08. Komponen dalam penilaian IKPA terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu (1) Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mendapat nilai sebesar 96,47, aspek ini terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA; (2) Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran mendapat nilai sebesar 98,72, aspek ini terdiri dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP dan TUP; dan (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran mendapat nilai sebesar 100, aspek ini terdiri dari capaian output. Rincian dokumen nilai IKPA disajikan pada Lampiran 11. Perbandingan target dan realisasi IKS-4 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKS-4 Tahun 2025

No	IKSK-4	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	91,00	98,08	107,78

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan capaian kinerja tahun pertama sebagai lembaga baru, pasca transformasi dari Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP), menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP). Oleh karena itu terdapat beberapa perbedaan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) di tahun 2025 dengan tahun 2023-2024, karena mengikuti dinamika kelembagaan yang baru.

IKSK-1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian, merupakan indikator baru di tahun 2025 dan tidak terdapat di tahun 2023-2024. Tampilan perbandingan IKS-1 tahun 2023-2025, disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja IKS-1 Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	2023	N/A	N/A	N/A
	2024	N/A	N/A	N/A
	2025	3,20	3,50	109,38

IKSK-2 Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian, merupakan indikator baru di tahun 2025 dan tidak terdapat di tahun 2023-2024. Kemudian pada tahun 2025 untuk IKS-2 ini juga tidak memiliki target capaian, sebab tidak ada alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian pada IKS-2 ini. Tampilan perbandingan IKS-2 tahun 2023-2025, disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja IKS-2 Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2023	N/A	N/A	N/A
	2024	N/A	N/A	N/A
	2025	-	-	-

IKSK-3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian untuk tahun 2025 memperoleh capaian nilai sebesar 88,63, kemudian tahun 2024 memperoleh capaian nilai sebesar 85,21, dan tahun 2023 memperoleh capaian nilai sebesar 83,47. Nilai Pembangunan ZI pada 3 (tiga) tahun terakhir cenderung

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan nilai tersebut merupakan hasil dari perbaikan kinerja manajemen yang terus berlangsung di BBPM SDLP. Tampilan perbandingan capaian kinerja IKSK-3 tahun 2024-2025 disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja IKSK-3 Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	2023	80,5	83,47	103,05
	2024	81	85,21	105,20
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian	2025	83,35	88,63	106,33

IKSK-4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian memperoleh capaian nilai sebesar 98,08 sedangkan di tahun 2024 memperoleh capaian nilai IKPA sebesar 95,62. Kemudian pada tahun 2023 untuk indikator kinerjanya merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan memperoleh capaian sebesar 88,30.

Perbedaan antara nilai IKPA dengan NKA yaitu untuk nilai IKPA merupakan alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian NKA merupakan tolak ukur yang lebih komprehensif (diukur melalui aplikasi SMART DJA) untuk menilai keseluruhan kinerja anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian hasil (output/outcome) dari belanja tersebut. Cakupan penilaian NKA lebih luas dibandingkan dengan nilai IKPA, karena nilai IKPA merupakan salah satu komponen pembentuk NKA. Perbandingan capaian IKSK-4 tahun 2023-2025 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja IKSK-4 Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	2023	87	88,30	101,50
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	2024	94,44	95,62	101,25
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	2025	91,00	98,08	107,78

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Renstra 2025-2029

Perbandingan realisasi kinerja BBPM SDLP tahun 2025 terhadap Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 disajikan pada Tabel 13. Capaian kinerja untuk IKS-1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2025 telah mencapai target Renstra yaitu 3,20 dan capaiannya 3,50. Kemudian untuk IKS-2 Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2025 tidak memiliki target dan capaian karena ketidaktersediaan anggaran untuk menjalankan kegiatan tersebut. Pada IKS-3 Nilai pPembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2025 juga telah mencapai target Renstra yaitu 83,35 dan capaiannya 88,63. Kemudian terakhir IKS-4 Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) tahun 2025 telah mencapai target Renstra yaitu 91,00 dan capaiannya 98,08. Secara umum capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 telah melampaui target Renstra yang ditetapkan. Perbandingan capaian realisasi kinerja terhadap target Renstra BBPM SDLP Tahun 2025-2029, disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Renstra BBPM SDLP Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Keterangan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks	Target	3,20	3,20	3,30	3,30	3,40
		Realisasi	3,50	-	-	-	-
		%	109,38	-	-	-	-
Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks	Target	-	51	55	60	70
		Realisasi	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	Target	83,35	83,35	83,40	83,45	83,50
		Realisasi	88,63	-	-	-	-
		%	106,33	-	-	-	-
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	Target	91,00	92,80	92,85	92,90	93,00
		Realisasi	98,08	-	-	-	-
		%	107,78	-	-	-	-

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Perencanaan yang matang dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh setiap tim baik pada kegiatan teknis maupun manajemen, didukung dengan

- penyusunan dokumen rencana aksi (Lampiran 15) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien;
- 2) Kebijakan pimpinan untuk memprioritaskan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perakitan dan modernisasi di bidang sumber daya lahan pertanian;
 - 3) Komunikasi yang terbangun secara baik akan menciptakan kerjasama tim yang solid dalam melaksanakan kegiatan;
 - 4) Serta dengan dukungan anggaran, SDM dan sarana prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan terkait pencapaian target kinerja dapat dicapai.

Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sasaran kegiatan tahun 2025 dan alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Kendala dan Alternatif Solusi

No	Sasaran Kegiatan	Kendala	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	- Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam hal mendukung pelayanan - Kompetensi SDM yang masih kurang terutama aspek pelayanan kepada pengguna	- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengidentifikasi peralatan yang rusak untuk dilakukan pengajuan baru - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimtek dll dalam bidang pelayanan
2	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	- Tidak tersedianya anggaran dikarenakan transformasi kelembagaan semula BSIP menjadi BRMP	- Mencari sumber penganggaran lain selain APBN
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	- Terdapat beberapa dokumen yang belum terdokumentasi dengan baik - Terdapat SOP lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang	- Melakukan koordinasi rutin antara kelompok/tim kerja terkait - Dilakukan review SOP dan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang sekarang
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	- Realisasi anggaran yang terhambat akibat adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan - Pagu penggunaan PNBP masih terblokir dikarenakan belum terbitnya ijin penggunaan PNBP	- Mengoptimalkan anggaran yang ada sehingga kegiatan masih dapat berjalan - Berkoordinasi secara intensif dengan Eselon 1 terkait pengajuan ijin penggunaan PNBP

3.1.5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan perhitungan efisiensi yang tercantum di dalam PMK 214/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam PMK ini, Standar Biaya Keluaran (SBK) digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. SBK merupakan indeks biaya

yang ditetapkan untuk menghasilkan satu volume keluaran, yang menjadi salah satu komponen dari standar biaya.

BBPM SDLP menggunakan tiga RO Dukungan Manajemen yang sudah SBKU, yaitu RO Layanan BMN, RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, serta RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi, sesuai dengan laporan monitoring penggunaan SBK (Tabel 15), jumlah anggaran yang dialokasikan pada RO Layanan BMN, Layanan Humas dan Informasi, Serta RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sudah mengacu pada SBKU.

Tabel 15. Data Penggunaan SBK BBPM SDLP Tahun 2025

No.	Program	RO	Jenis	Uraian SBK	Indeks		Realisasi	RVRO	Indeks		Keterangan
			SBK		SBK	SBK			Realisasi Anggaran	Penggunaan SBK	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	8.458.000	1	1	8.458.000	Ya	
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	40.170.700	1	1	40.170.700	Ya	
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	52.435.100	1	1	52.435.100	Ya	

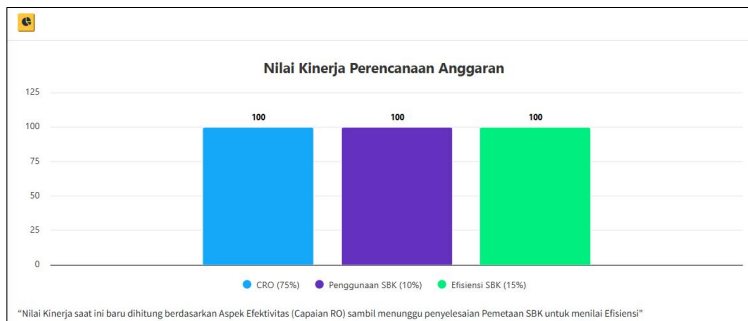
Capaian BBPM SDLP untuk tingkat efisiensi pada RO Layanan BMN adalah sebesar 98%, Layanan Humas dan Informasi sebesar 91%, Serta RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar 78% sedangkan untuk nilai efisiensi pada RO SBKU tersebut adalah 20%, data disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Data Efisiensi SBK BBPM SDLP Tahun 2025

No.	Program	RO	Jenis	Uraian SBK	Indeks		Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks		Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Keterangan
			SBK		SBK	SBK				Realisasi Anggaran	Selisih	Per RO (%)	Per RO (%)	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.956 Layanan BMN (Layanan)	SBKU	Layanan BMN untuk satker Eselon I/Setingkat	480.000.000	8.458.000	1	1	1	8.458.000	471.542.000	98	20	Diperhitungkan maksimal (max=20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
2	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	SBKU	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi [Layanan]	458.000.000	40.170.700	1	1	1	40.170.700	417.829.300	91	20	Diperhitungkan maksimal (max=20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.
3	WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	SBKU	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	52.435.100	1	1	1	52.435.100	187.564.900	78	20	Diperhitungkan maksimal (max=20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Berdasarkan laporan Sistem Informasi MONEV Kemenkeu efisiensi SBK BBPM SDLP adalah 100% (tersaji pada Gambar 5), sedangkan nilai penggunaan SBK BBPM SDLP sebesar 100% dengan mengacu pada formula:

$$\text{Penggunaan SBK} = \frac{\text{Jumlah RO menggunakan SBK}}{\text{Jumlah RO SBK}} \times 100\%$$



Gambar 2. Efisiensi Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BBPM SDLP dalam pencapaian sasaran kegiatan dengan masing-masing indikatornya yang terdapat sebanyak 4 Indikator Kinerja (IKSK), dilaksanakan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan berbasis waktu dengan analisis sebagai berikut:

1) IKSK-1 Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian

Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian berupa layanan Informasi Geospasial Tematik Pertanian secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepuasan pengguna layanan. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan kualitas pelayanan yang meliputi unsur-unsur, Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh penerapan standar pelayanan yang konsisten, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, penerapan sistem pelayanan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna turut meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap layanan pengujian sumber daya lahan pertanian.

Analisis Kendala/Kegagalan

Meskipun secara umum menunjukkan capaian yang baik, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan ini belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja. Keterbatasan jumlah dan kapasitas peralatan pada periode tertentu berdampak pada antrean layanan dan potensi keterlambatan penyelesaian permintaan. Fluktuasi jumlah permintaan belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia teknis, sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan. Di sisi lain, pemahaman sebagian pengguna terhadap prosedur dan persyaratan layanan

masih perlu ditingkatkan, yang berdampak pada terjadinya pengulangan proses administrasi dan berpengaruh terhadap persepsi kepuasan layanan.

Selain itu dengan skema perhitungan tarif dan biaya menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 terjadi pemblokiran anggaran pagu penggunaannya yang dibutuhkan untuk pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan terutama pada sarana peralatan yaitu keterlambatan pengadaan peralatan.

2) IKS-2 Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian

Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja ini tidak dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan dikarenakan tidak adanya alokasi penganggaran di tahun 2025.

3) IKS-3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan pembangunan zona integritas telah berkontribusi positif terhadap terwujudnya birokrasi yang lebih efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BBPM SDLP pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan internal organisasi mendorong terbangunnya budaya kerja yang berorientasi pada layanan prima. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi, pelayanan, dan pelaporan kinerja telah meningkatkan kecepatan, ketepatan, serta transparansi layanan. Di sisi sumber daya manusia, kegiatan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan turut meningkatkan profesionalisme dan responsivitas pegawai dalam memberikan layanan.

Analisis Kendala/Kegagalan

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, pencapaian tersebut masih menghadapi beberapa kendala. Proses penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi yang dinamis memerlukan waktu adaptasi yang tidak singkat, sehingga pada periode tertentu berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selain itu, tingkat pemahaman dan implementasi reformasi birokrasi di seluruh unit kerja belum sepenuhnya merata. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang tertentu, serta beban kerja yang tinggi, berpotensi mempengaruhi konsistensi penerapan prinsip efisiensi dan layanan prima. Di sisi lain, integrasi sistem informasi antarunit masih perlu ditingkatkan agar proses kerja dapat berjalan lebih sinergis dan optimal.

4) IKSK-4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Analisis Keberhasilan

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di BBPM SDLP telah memberikan kontribusi signifikan terhadap terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Penyusunan anggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan serta indikator kinerja yang terukur mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dimulai dari awal tahun sampai akhir tahun yang ditandai dengan kegiatan seminar hasil.

Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara mendukung pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi dan tepat sasaran. Proses pelaporan keuangan dan kinerja yang dilaksanakan secara tepat waktu dan andal turut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa juga berperan penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

Analisis Kendala/Kegagalan

Meskipun secara umum pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian pernyataan kinerja. Perubahan kebijakan anggaran dan penyesuaian alokasi pada tahun berjalan berpotensi menimbulkan revisi perencanaan yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, serta kompleksitas regulasi pengadaan barang/jasa, dapat mempengaruhi kelancaran proses realisasi anggaran. Di sisi lain, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi agar kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja dapat terjaga secara optimal.

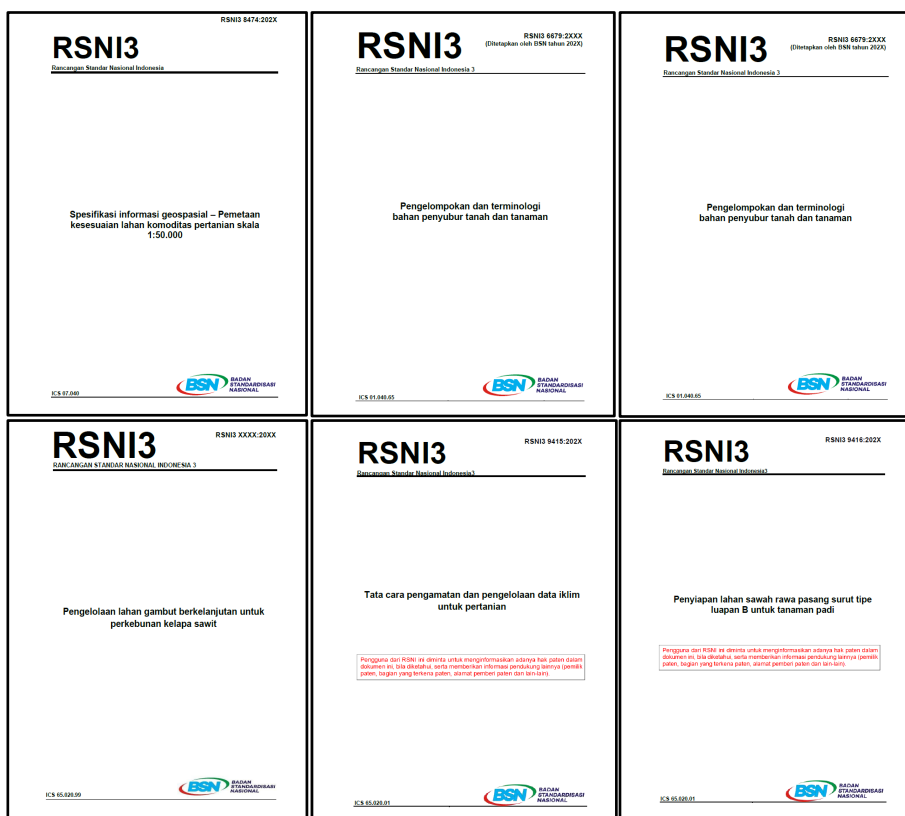
3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1. Perumusan Rancangan Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian

Pada kegiatan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di tahun 2025 BBPM SDLP telah menyelesaikan sebanyak 6 judul RSNI, dengan output dokumen RSNI3. Dokumen RSNI3 yang dihasilkan telah melalui tahap rapat teknis, uji implementasi, rapat konsensus, dan jajak pendapat. Rincian dokumen RSNI3 yang telah dihasilkan oleh BBPM SDLP tersaji pada Tabel 17.

Tabel 17. Rincian Dokumen RSNI3 yang dihasilkan BBPM SDLP Tahun 2025

Standar Bidang Sumber Daya Lahan Pertanian						
No	Judul RSNI3	Komite Teknis Perumus	Status Konsensus	Status Jajak Pendapat RSNI3	Status Penetapan SNI	UK/UPT Konseptor
1	RSNI3 8474:2025, Penyusunan Peta Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Pertanian Strategis Semidetil Skala 1:50.000	07-01 Informasi Geografi/ Geomatika - BIG	Konsensus pada 30 Oktober 2025	Masa JP: 17 November 2025 – 16 Desember 2025	Penetapan SNI pada Tahun 2025	BBPM SDLP
2	RSNI3 9380:2025, Slag Besi/ Baja Sebagai Bahan Penyubur Tanah	65-06 Produk Agro Kimia	Konsensus pada 03 Juni 2025	Masa JP: 08 Agustus 2025 – 06 September 2025	Penetapan SNI pada Tahun 2025	BPP Tanah dan Pupuk
3	RSNI3 6679:2025, Pengelompokan dan Terminologi Bahan Penyubur Tanah dan Tanaman	65-06 Produk Agro Kimia	Konsensus pada 03 Juni 2025	Masa JP: 23 Juni 2025 – 22 Juli 2025	Penetapan SNI pada Tahun 2025	BPP Tanah dan Pupuk
4	RSNI3 9421:2025, Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	65-24 Pertanian Berkelanjutan	Konsensus pada 04 November 2025	Masa JP: 14 November 2025 – 13 Desember 2025	Penetapan SNI pada Tahun 2025	BPP Tanah dan Pupuk
5	RSNI3 9415:2025, Tata Cara Pengamatan dan Pengelolaan Data Iklim untuk Pertanian	65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian - Kementan	Konsensus pada 03 November 2025	Masa JP: 13 November 2025 – 12 Desember 2025	Penetapan SNI pada Tahun 2025	BPP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
6	RSNI3 9416:2025, Penyiapan Lahan untuk Tanaman Padi di Lahan Rawa Pasang Surut	65-23 Sumberdaya Lahan Pertanian - Kementan	Konsensus pada 04 November 2025	Masa JP: 13 November 2025 – 12 Desember 2025	Penetapan SNI pada Tahun 2025	BPP Lingkungan Pertanian



Gambar 3. Dokumen RSNi3 yang dihasilkan oleh UK/UPT Lingkup BBPM SDLP Tahun 2025

3.2.2. Sistem Informasi Terintegrasi (SISCROP, SIAP TANAM, SIFORTUNA)

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) melalui UPT-nya yaitu Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (BPP AHP), menggelar ekspose dan diseminasi Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan tiga platform utama kedalam satu kesatuan sistem informasi yaitu SISCROP (monitoring kondisi lahan secara realtime), SIAP TANAM (perencanaan dan rekomendasi jadwal tanam yang presisi), dan SIFORTUNA (prakiraan serangan OPT untuk antisipasi dini). Integrasi ini memungkinkan pengguna memperoleh data yang akurat, cepat dan saling terhubung, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan Keputusan yang lebih cepat dan responsive terhadap kondisi lapangan.



Gambar 4. Dokumentasi Integrasi Sistem Informasi

3.2.3. Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2

Pada tahun 2025, BBPM SDLP berhasil mengakses fasilitas proyek RPB REDD+for result period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan (KP) III Program Implementasi NDC pada sektor (nasional) di sektor pertanian sebesar Rp 17.167.700.000,- untuk implementasi selama 3 tahun, mulai tahun 2025 hingga tahun 2027.

Pada tahun 2025 untuk implementasi proyek mulai bulan Juli 2025 hingga Desember 2025 melalui pengusulan TOR kegiatan sebanyak tiga kali. Kegiatan yang berhasil terealisasi diantaranya dilakukan untuk mencapai output proyek seperti: (1) Menentukan faktor emisi dari komoditas di sektor pertanian; (2) Melaporkan inventarisasi emisi dan metodologi pengukuran aksi adaptasi; (3) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan institusional di sektor pertanian mengenai aksi pengendalian perubahan iklim; (4) Merumuskan standar dan penyebarluasan informasi; (5) Merumuskan kerangka kebijakan implementasi Nilai Ekonomi Karbon di sektor pertanian; dan (6) Mengembangkan lembaga penilaian kesesuaian untuk skema Nilai Ekonomi Karbon di sektor pertanian.

Ditinjau dari penyerapan dan realisasi anggaran, BBPM SDLP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.463.246.052,- atau 8,52% dari *Annual Work Plan* (AWP) keseluruhan selama 3 tahun implementasi. Tentu diperlukan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan agar lebih banyak kegiatan yang terealisasi dan berdampak bagi pihak-pihak lain yang menerima manfaat.



Gambar 5. Dokumentasi Rangkaian Kegiatan Proyek RBP REDD+

3.2.4. Penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas birokrasi melalui penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Acara digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, dihadiri oleh berbagai Unit Kerja (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya mereka dalam membangun birokrasi yang terbuka, responsive, dan informatif.

Dalam ajang bergengsi tersebut, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) berhasil meraih pengakuan nasional dengan menempati peringkat ke-10 dalam kategori Badan Publik Informatif Tingkat Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian. Pencapaian ini mencerminkan keseriusan BBPM SDLP dalam menyediakan informasi publik yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025

3.2.5. BBPM SDLP Ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRo)

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk, berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17065:2012 yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kepercayaan ini memperkuat komitmen BBPM SDLP dalam menjamin kualitas dan keandalan produk pupuk bagi pertanian yang berkelanjutan.



Gambar 7. Dokumentasi Sertifikat Akreditasi Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk

3.2.6. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik

Melalui inovasi digital Sistem Informasi Standing Crop (SisCrop), Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) berhasil meraih Piagam Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 8. Dokumentasi Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2025

3.2.7. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

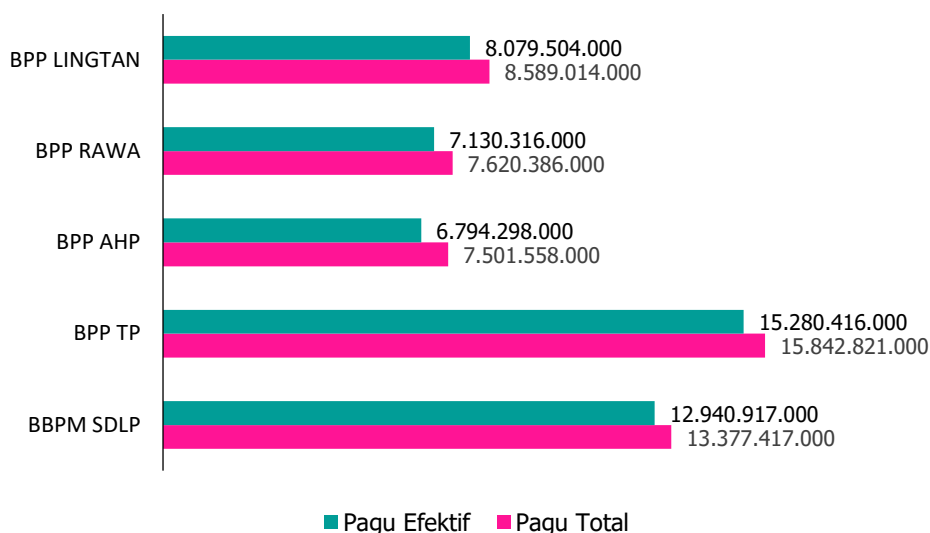
Tahun 2025 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP) melakukan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015. Hal ini merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi tetap memenuhi persyaratan standar internasional terkait kualitas dan sebagai upaya menjaga konsistensi mutu serta memastikan seluruh prosedur yang ada telah sesuai dengan standar. Dikarenakan juga telah terjadinya proses perubahan nomenklatur yang semula Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (BBPM SDLP), yang tentunya akan mempengaruhi roadmap, visi, misi, tugas dan fungsi organisasi. Pemeliharaan dan penerapan sertifikasi ISO 9001:2015 juga membantu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, meminimalkan risiko, dan fokus pada pelayanan publik yang lebih baik serta mendorong perbaikan berkelanjutan.



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran lingkup BBPM SDLP tahun 2025 mempunyai pagu awal sebesar Rp 44.973.989.000,- dengan rincian satker BBPM SDLP sebesar Rp 11.656.241.000,-; BPP TP sebesar Rp 11.984.452.000,-; BPP AHP sebesar Rp 6.384.104.000,-; BPP LINGTAN sebesar Rp 8.001.025.000,-; dan BPP RAWA sebesar Rp 6.948.167.000,-. DIPA BBRM SDLP mengalami beberapa kali revisi dikarenakan adanya pengalihan anggaran, pemblokiran, pembukaan blokir, penambahan pagu PNPB, dan penambahan anggaran hibah. Hal tersebut mengakibatkan anggaran lingkup BBPM SDLP mengalami perubahan, berdasarkan DIPA revisi terakhir menjadi sebesar Rp 52.931.196.000,- dengan adanya pagu blokir sebesar Rp 2.705.745.000 sehingga pagu efektif lingkup BBPM SDLP sebesar Rp 50.225.451.000,-. Data mengenai rincian DIPA revisi terakhir UK/UPT lingkup BBPM SDLP disajikan pada Gambar 10.



Gambar 10. Data Anggaran Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan DIPA Revisi Terakhir

Hingga akhir Desember 2025, total realisasi anggaran yang berhasil diserap lingkup BBPM SDLP sebesar Rp 49.623.956.493,- atau 93,75% dari pagu total anggaran lingkup sebesar Rp 52.931.196.000,- dan 98,80% dari total pagu efektif sebesar Rp 50.225.451.000,-.

Besaran realisasi anggaran UK/UPT lingkup BBPM SDLP berdasarkan pagu total yaitu BBPM SDLP Rp 12.750.294.395,- atau 95,31%; BRMP Tanah dan Pupuk Rp 15.097.516.705,- atau 95,30%; BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Rp 6.716.469.411,- atau 89,63%; BRMP Pertanian Lahan Rawa Rp 7.021.797.104,- atau 92,14%; dan BRMP Lingkungan Pertanian Rp 8.037.878.878,- atau 93,58% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 3.307.239.507,- atau 6,25%.

Kemudian besaran realisasi anggaran UK/UPT lingkup BBPM SDLP berdasarkan pagu efektif yaitu BBPM SDLP Rp 12.750.294.395,- atau 98,51%; BRMP Tanah dan Pupuk Rp 15.097.516.705,- atau 98,80%; BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian Rp 6.716.469.411,- atau 98,85%; BRMP Pertanian Lahan Rawa Rp 7.021.797.104,- atau 98,48%; dan BRMP Lingkungan Pertanian Rp 8.037.878.878,- atau 99,48% dengan demikian sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 601.494.507,- atau 1,20%. Rincian data mengenai realisasi anggaran UK/UPT Lingkup BBPM SDLP disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Anggaran UK/UPT Lingkup BBPM SDLP

Satuan Kerja	Pagu Total (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Terhadap Pagu Total	% Terhadap Pagu Efektif
BBPM SDLP	13.377.417.000	436.500.000	12.940.917.000	12.750.294.395	95,31	98,53
BPP TP	15.842.821.000	562.405.000	15.280.416.000	15.097.516.705	95,30	98,80
BPP AHP	7.501.558.000	707.260.000	6.794.298.000	6.716.469.411	89,53	98,85
BPP RAWA	7.620.386.000	490.070.000	7.130.316.000	7.021.797.104	92,14	98,48
BPP LINGTAN	8.589.014.000	509.510.000	8.079.504.000	8.037.878.878	93,58	99,48
Jumlah	52.931.196.000	2.705.745.000	50.225.451.000	49.623.956.493	93,75	98,80

3.3.1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan

Program UK/UPT lingkup BBPM SDLP tahun 2025 antara lain meliputi Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (NTDSI) dan Program Dukungan Manajemen. Kegiatan yang terdapat didalam Program NTDSI yaitu Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.804.599.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 6.676.950.209,- atau 98,12%, kemudian kegiatan yang terdapat didalam Program Dukungan Manajemen yaitu Dukungan manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp 43.420.852.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 42.962.632.989,- atau 98,94%. Rincian data realisasi anggaran berdasarkan program disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Pagu Total (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				
7911	Kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	6.804.599.000	6.683.272.109	98,21	121.326.891
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen				
6918	Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian	43.420.852.000	42.962.632.989	98,94	458.219.011
Total		50.225.451.000	49.645.905.098	98,84	579.545.902

3.3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja dalam rangka operasional kegiatan lingkup BBPM SDLP dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun

tetap menjamin terlaksananya seluruh kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. Pagu anggaran lingkup BBPM SDLP dialokasikan untuk belanja pegawai, barang, dan modal, rincian dari pagu dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Realisasi Anggaran UK/UPT Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jenis Belanja

UK/UPT/Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BBPM SDLP	13.377.417.000	12.750.294.395	95,31
Belanja Pegawai	3.818.219.000	3.755.359.535	98,35
Belanja Barang	9.519.049.000	8.954.794.859	94,07
Belanja Modal	40.149.000	40.140.001	99,98
BPP TP	15.842.821.000	15.097.516.705	95,30
Belanja Pegawai	5.531.327.000	5.477.814.589	99,03
Belanja Barang	10.311.494.000	9.619.702.116	93,29
Belanja Modal	0	0	0,00
BPP AHP	7.501.558.000	6.716.469.411	89,53
Belanja Pegawai	2.827.284.000	2.764.430.168	97,78
Belanja Barang	4.664.200.000	3.942.015.943	84,52
Belanja Modal	10.074.000	10.023.000	99,50
BPP RAWA	7.620.386.000	7.021.797.104	92,14
Belanja Pegawai	3.018.379.000	2.994.225.092	99,20
Belanja Barang	4.602.007.000	4.027.572.012	87,52
Belanja Modal	0	0	0,00
BPP LINGTAN	8.589.014.000	8.037.878.878	93,58
Belanja Pegawai	3.796.028.000	3.757.084.844	98,97
Belanja Barang	4.792.986.000	4.280.794.034	89,31
Belanja Modal	0	0	0,00
Total	52.931.196.000	49.623.956.493	98,80

3.3.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2025 lingkup BBPM SDLP menerima anggaran dari PNBP yang berasal dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Target PNBP lingkup BBPM SDLP sebesar Rp 2.835.010.000,- dengan rincian BBPM SDLP sebesar Rp 63.250.000,-; BPP TP sebesar Rp 2.000.000.000,-; BPP AHP sebesar Rp 18.600.000,-; BPP RAWA sebesar Rp 171.060.000,-; dan BPP LINGTAN sebesar Rp 582.100.000,-.

Realisasi PNBP tahun 2025 lingkup BBPM SDLP sebesar Rp 3.541.111.053,- atau 124,91% dengan rincian BBPM SDLP sebesar Rp 537.164.549,- atau 849,27%; BPP TP sebesar Rp 1.980.278.960,- atau 99,01%; BPP AHP sebesar Rp 84.371.450,- atau 453,61; BPP RAWA sebesar Rp 230.832.500,- atau 134,94%; dan BPP LINGTAN sebesar Rp 708.463.594,- atau 121,71%. Rincian data disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi PNPB UK/UPT Lingkup BBPM SDLP Tahun 2025

Satuan Kerja	Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan		Capaian (%)
		Target	Realisasi	
BBPM SDLP	Umum	8.250.000	31.602.524	383,06
	Fungsional	55.000.000	505.562.025	919,20
	Total	63.250.000	537.164.549	849,27
BRMP Tanah dan Pupuk	Umum	-	56.938.460	#DIV/0!
	Fungsional	2.000.000.000	1.923.340.500	96,17
	Total	2.000.000.000	1.980.278.960	99,01
BRMP Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Umum	4.800.000	65.071.450	1.355,66
	Fungsional	13.800.000	19.300.000	139,86
	Total	18.600.000	84.371.450	453,61
BRMP Pertanian Lahan Rawa	Umum	21.060.000	22.465.000	106,67
	Fungsional	150.000.000	208.367.500	138,91
	Total	171.060.000	230.832.500	134,94
BRMP Lingkungan Pertanian	Umum	7.500.000	54.067.605	720,90
	Fungsional	574.600.000	654.395.989	113,89
	Total	582.100.000	708.463.594	121,71
Lingkup BBPM SDLP	Umum	41.610.000	230.145.039	553,10
	Fungsional	2.793.400.000	3.310.966.014	118,53
	Total	2.835.010.000	3.541.111.053	124,91

3.3.4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Hibah

BBPM SDLP pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran hibah sebesar Rp 4.769.073.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.752.287.751,- atau 99,64%. Hibah lingkup BBPM SDLP berasal dari hibah dalam negeri dan luar negeri yang bersumber dari kegiatan hibah BBPM SDLP dan BPP TP, dengan judul kegiatan antara lain (1) *Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping Systems in Coastal Indonesia*, merupakan kerjasama BBPM SDLP dengan Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia yang berfokus pada penelitian pertanian, pengelolaan sumber daya lahan, dan metode modernisasi pertanian ; (2) *National Soil Information System to Support The Transformation of Agrifood System In AFACI Countries*, merupakan kerjasama BBPM SDLP dengan AFACI (Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative), kegiatan kerjasama ini berfokus pada pengembangan basis data profil/sampel tanah nasional yang komprehensif berdasarkan standar regional; (3) *Indonesia Testbed Project The Korea Agriculture Technology Promotion Agency (KoAT)*, merupakan Kerjasama BBPM SDLP dengan Hirata Corporation untuk pengembangan teknologi pertanian terutama dalam uji efektivitas pupuk dan rekomendasi pengelolaan lahan; (4) Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi Merek Petroganik, merupakan Kerjasama

BRMP Tanah dan Pupuk dengan PT Petrokimia Gresik berfokus pada memastikan kualitas bahan baku dan produk petrogekanik sesuai dengan standar subsidi pemerintah. Rincian realisasi masing-masing hibah tersaji pada Tabel 22.

Tabel 22. Pagu dan Realisasi Anggaran Hibah Lingkup BBPM SDLP

No	Judul Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping Systems in Coastal Indonesia	261.750.000	261.611.681	99,95
2	National Soil Information System to Support The Transformation of Agrifood System In AFACI Countries	480.471.000	477.312.756	99,34
3	Indonesia Testbed Project The Korea Agriculture Technology Promotion Agency (KoAT)	642.156.000	635.786.234	99,01
4	Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi Merek Petrogekanik	3.384.696.000	3.377.577.080	99,79
Jumlah		4.769.073.000	4.752.287.751	99,64



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Hibah *Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping Systems in Coastal Indonesia*



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Survei Tanah pada Hibah *National Soil Information System to Support The Transformation of Agrifood System In AFACI Countries*



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Hibah *Indonesia Testbed Project The Korea Agriculture Technology Promotion Agency (KoAT)*



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Hibah Pengujian Mutu Pupuk Organik Susidi

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja BBPM SDLP berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja memuat capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan publik, serta sebagai dasar perbaikan kinerja berkelanjutan.

Capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan juga pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis BBPM SDLP periode 2025-2029, sebagai lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Pada tahun 2025 BBPM SDLP telah melaksanakan 4 (empat) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Capaian IKSK-1 Indeks kepuasan layanan pengujian sumber daya lahan pertanian sebesar 3,50 atau 109,38% dari target 3,20 menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK-2 Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2025 tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan, disebabkan tidak adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKSK-2. Capaian IKSK-3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian sebesar 88,63 atau 106,33% dari target 83,35 menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK-4 Nilai Indikator Kinerja Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian sebesar 98,08 atau 107,78% dari target 91 menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat berhasil. Dengan demikian, capaian kinerja BBPM SDLP tahun 2025 telah mencapai rata-rata persentase sebesar 107,83% atau dengan kategori keberhasilan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja lainnya yang telah dicapai BBPM SDLP pada tahun 2025 antara lain yaitu, (1) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) sebanyak 6 (enam) judul RSNI dengan output dokumen RSNI3; (2) Peluncuran sistem informasi terintegrasi, yang mengintegrasikan tiga platform utama kedalam satu kesatuan sistem informasi (SISCROP, SIAP TANAM, SIFORTUNA); (3) Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2; (4) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik; (5) Penetapan sebagai lembaga Sertifikasi Produk (LSPro); (6) Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2025; dan (7) Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu SNI 9001:2015.

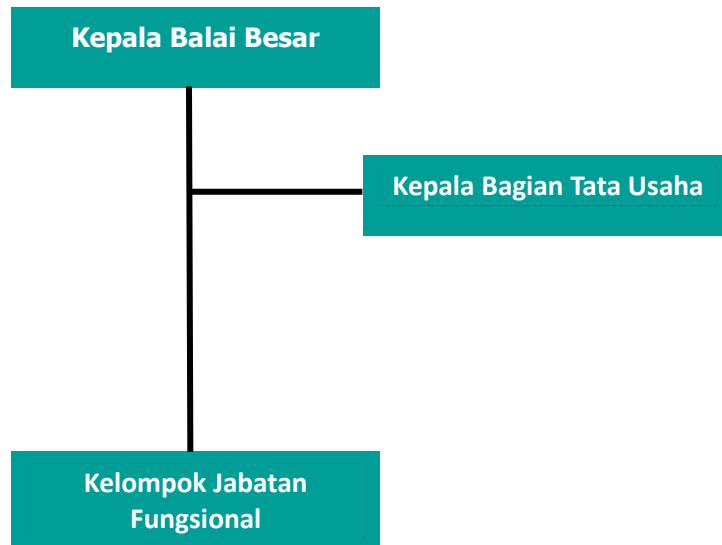
Keberhasilan dalam pencapaian kinerja BBPM SDLP berkat perencanaan yang matang dari pelaksanaan kegiatan, kebijakan pimpinan, komunikasi, kerjasama dan kolaborasi tim yang solid baik dari aspek manajemen maupun teknis.

Dalam pencapaian keberhasilan kinerja tidak lepas dari kendala, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi khusus; pemotongan anggaran; masa transformasi kelembagaan yang mengakibatkan perubahan sasaran, indikator, dan target kegiatan pada saat periode anggaran telah berjalan.

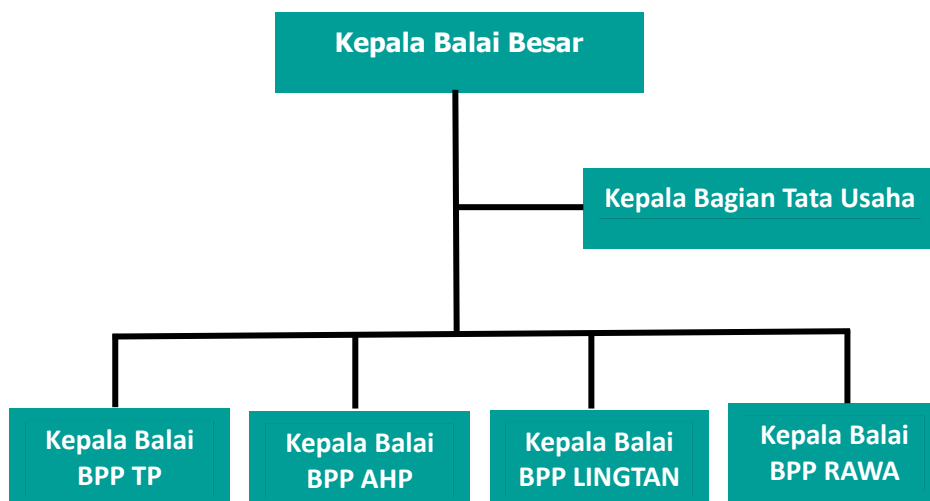
Capaian kinerja yang telah dicapai BBPM SDLP tahun 2025 akan menjadi bagian evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Beberapa langkah strategis sebagai upaya peningkatan kinerja yaitu: (1) Perencanaan yang matang dan sistematis setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama, dengan mekanisme yang terkontrol dan tervalidasi melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; (2) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu, kualitas, dan sasaran pengguna hasil yang diharapkan; (3) Pemberian "*reward and punishment*" dilakukan secara proporsional kepada setiap penanggungjawab kegiatan berdasarkan penggunaan anggaran dan tingkat capaian kinerjanya, dan (4) Melakukan terobosan baru penyusunan program kerja/anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis IT agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.

LAMPIRAN

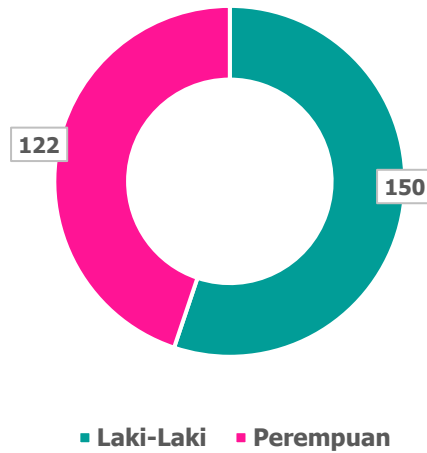
Lampiran 1. Struktur Organisasi Internal BBPM SDLP



Lampiran 2. Struktur Organisasi Lingkup BBPM SDLP



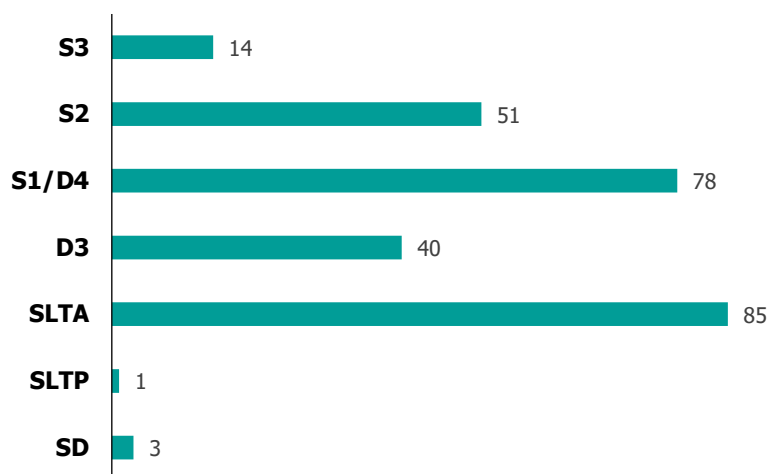
Lampiran 3. Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jenis Kelamin



Lampiran 4. Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jenis Pegawai



Lampiran 5. Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Lampiran 6. Keragaan Pegawai Lingkup BBPM SDLP Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jenjang Fungsional	BRMP SDLP	BRMP Rawa	BRMP TP	BRMP AHP	BRMP Lingtan	Jumlah
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	50	43	83	43	53	272
STRUKTURAL	2	2	2	2	2	10
PELAKSANA/JFU	13	18	41	15	19	106
JABATAN FUNSIONAL TERTENTU	35	23	40	26	32	156
ANALIS SDM APARATUR	3		1	1	1	6
a. Analis SDM Aparatur Ahli Madya	1					1
b. Analis SDM Aparatur Ahli Muda						
c. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1					1
d. Pranata SDM Aparatur Terampil	1		1			2
e. Calon Pranata SDM Aparatur Ahli Pertama				1	1	2
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN	2		3			5
a. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1					1
b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1		3			4
ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	5	1	6	5	2	19

a. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	1			1		2
b. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	3	1	5	3	2	14
c. Calon Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	1		1	1		3
ANALIS STANDARDISASI	7	8	8	6	9	38
a. Analis Standardisasi Ahli Muda	1		2	1	5	9
b. Analis Standardisasi Ahli Pertama	5	4	4	3	3	19
c. Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	1	4	2	2	1	10
ARSIPARIS	1			2		3
a. Arsiparis Ahli Pertama	1					1
b. Calon Arsiparis Ahli Pertama				2		2
PENGAWAS BENIH TANAMAN		1				1
a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda		1				1
PARAMEDIK KARANTINA HEWAN					1	1
a. Paramedik Karantina Hewan Mahir					1	1
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN					7	7
a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda					2	2
b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama					5	5
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN					1	1
a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama					1	1
PENYULUH PERTANIAN		3				3
a. Penyuluh Pertanian Ahli Madya		1				1
b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda		2				2
PEREKAYASA				1		1
a. Perekayasa Ahli Pertama				1		1
PERENCANA	2		1	1		4
a. Perencana Ahli Madya	1					1
b. Perencana Ahli Pertama	1		1	1		3
PRANATA HUMAS	3					3
a. Pranata Humas Ahli Muda	1					1
b. Pranata Humas Ahli Pertama	1					1
c. Calon Pranata Humas Ahli Pertama	1					1
PRANATA KEUANGAN APBN	1			1		2
a. Pranata Keuangan APBN Penyelia				1		1

b. Pranata Keuangan APBN Mahir	1					1
PRANATA KOMPUTER	2	4		2		8
a. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	4		1		6
b. Pranata Komputer Terampil	1					1
c. Calon Pranata Komputer Terampil				1		1
PUSTAKAWAN			1		1	2
a. Pustakawan Ahli Pertama					1	1
b. Pustakawan Terampil			1			1
TEKNISI LITKAYASA	9	6	20	7	10	52
a. Teknisi Litkayasa Penyelia	1	4	3	1	1	10
b. Teknisi Litkayasa Mahir	1		6		7	14
c. Teknisi Litkayasa Terampil	7	1	4	4	2	18
d. Teknisi Litkayasa Pemula		1	7	2		10

Lampiran 7. Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Awal



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
 TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256
 WEBSITE: www.sdip.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip_sdip@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asdianto
 Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fadry Djufry
 Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Fadry Djufry

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Pertama



Asdianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	- (Standar)
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian	83,35 (Nilai ZI)
3	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku)	87 (Nilai SMART)

Kegiatan

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen
Sumberdaya Lahan Pertanian

Anggaran

Rp. 11.656.781.000,-

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua


Fadjry Djufray

Pihak Pertama


Asdianto

Lampiran 8. Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Revisi ke-1



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256
WEBSITE: www.sdlp.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip.sdlp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asdianto
Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Mei 2025

Pihak Kedua  Fadjry Djufry	Pihak Pertama  Asdianto
--	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Produk Sumber Daya Lahan Pertanian	Persentase Produk Sumber Daya Lahan Pertanian yang Tersertifikasi	100 (%)
2	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	83,35 (Nilai)
3	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	87 (Nilai)

Kegiatan

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian

Anggaran

Rp. 12.791.241.000,-

Jakarta, 19 Mei 2025

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Pihak Pertama


Asdianto

Lampiran 9. Perjanjian Kinerja BBPM SDLP Tahun 2025 Revisi Terakhir

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, CIMANGGU, BOGOR 16114 TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256 WEBSITE: sdlahan.bmp.pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Asdianto Jabatan : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian	
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.	
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 31 Desember 2025	
Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
 Fadry Djufry	 Asdianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
		UTAMA		
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	3,20	Indeks (1-4)
2	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	2.1. Indeks Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	-	Indeks (1-100)
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	83,35 (Nilai)	Nilai (1-100)
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	91,00 (Nilai)	Nilai (1-100)

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 1.424.526.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Rp. 1.424.526.000
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp. 0
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 0
WA	Dukungan Manajemen	Rp. 11.952.891.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp. 11.952.891.000
		Rp. 13.377.417.000

Jakarta, 31 Desember 2025

Pihak Kedua,


Fadry Djufry

Pihak Pertama,


Asdianto

Lampiran 10. Manual IKU BBPM SDLP Tahun 2025

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025 BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Sasaran dan Indikator Kinerja:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks	3,20
2	Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Pertanian	Indeks	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	83,35
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Nilai	91,00

1. Manual Indikator 1 :

Program	HA – Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Sasaran Kegiatan	SK.1 - Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui peningkatan kepuasan layanan pengujian terutama Informasi Geospasial Tematik Pertanian
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Sumber Daya Lahan Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat kepuasan layanan Informasi Geospasial Tematik Pertanian terhadap kualitas layanan Informasi Geospasial Tematik Pertanian yang diberikan Formula : Instrumen pengukuran IKM yang disusun dari PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Skala Likert 1-4 Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan Informasi Geospasial Tematik Pertanian yang dilakukan di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: 3,20 2026: 3,20 2027: 3,30 2028: 3,30 2029: 3,40
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	Indeks pemanfaatan teknologi pertanian
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading

Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)									
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize									
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir									
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulanan ☐ Semesteran ☒ Tahunan									
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data IGT belum tersedia</td> <td>Updating data IGT</td> </tr> <tr> <td>SDM belum memenuhi kompetensi</td> <td>Peningkatan kapasitas kompetensi SDM</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Data IGT belum tersedia	Updating data IGT	SDM belum memenuhi kompetensi	Peningkatan kapasitas kompetensi SDM		
Potensi Risiko	Mitigasi									
Data IGT belum tersedia	Updating data IGT									
SDM belum memenuhi kompetensi	Peningkatan kapasitas kompetensi SDM									
Catatan										

2. Manual Indikator 2 :

Program	HA – Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
Sasaran Kegiatan	SK 2 Tenujudnya Pemanfaatan Teknologi Sumber Daya Lahan Pertanian
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung pencapaian swasembada melalui proses pemanfaatan teknologi oleh petani / organisasi petani / pelaku usaha pertanian dengan lebih intensif luas dan berkelanjutan dalam usaha taninya
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan teknologi sumber daya lahan pertanian Formula : $\frac{\text{Jumlah Teknologi Yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Teknologi yang dihasilkan t s/d t-5 (TKT > 7)}} \times 100\%$ *Hasil Persentase dikonversi kedalam skala 0-25 => Kurang 26-50 => Sedang 51-75 => Baik 76-100 => Sangat Baik Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat pemanfaatan teknologi sumberdaya lahan pertanian yang dilakukan oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Satuan	Indeks
Target	2025: - 2026: 51 2027: 55 2028: 60 2029: 70
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, Peneliti, Petani, Pelaku Usaha
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact

Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading															
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersem Teknologi pit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)															
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize															
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian															
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian															
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir															
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan															
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesulitan mengakses atau mengadopsi teknologi</td> <td>Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi yang akan dimanfaatkan</td> </tr> <tr> <td>Terjadinya Perubahan iklim</td> <td>Membuat kebijakan untuk mendukung teknologi yang selaras dengan perubahan iklim</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Kesulitan mengakses atau mengadopsi teknologi	Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi yang akan dimanfaatkan	Terjadinya Perubahan iklim	Membuat kebijakan untuk mendukung teknologi yang selaras dengan perubahan iklim								
Potensi Risiko	Mitigasi															
Kesulitan mengakses atau mengadopsi teknologi	Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi yang akan dimanfaatkan															
Terjadinya Perubahan iklim	Membuat kebijakan untuk mendukung teknologi yang selaras dengan perubahan iklim															
Catatan																

3. Manual Indikator 3 :

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK.3 – Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK.4 – Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK / WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang mengukur nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan <i>check list</i> penilaian WBK / WBBM Formula : Instrumen pengukuran nilai pembangunan zona integritas menuju WBK / WBBM dengan perhitungan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan <i>check list</i> penilaian WBK / WBBM dan penilaian mandiri Tujuan : Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas sebagai dasar mewujudkan reformasi birokrasi
Satuan	Nilai
Target	2025: 83,35 2026: 88,63 2027: 83,40 2028: 83,45 2029: 83,50
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-
Dukungan Indikator Kinerja Program	-
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High

Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact															
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading															
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)															
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize															
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian															
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian															
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir															
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan															
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penyalahgunaan wewenang</td> <td>Menerapkan whistle blowing system (WBS) untuk pelaporan pelanggaran</td> </tr> <tr> <td>Gratifikasi dan KKN</td> <td>Melakukan sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi (pencegahan KKN dan gratifikasi)</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Penyalahgunaan wewenang	Menerapkan whistle blowing system (WBS) untuk pelaporan pelanggaran	Gratifikasi dan KKN	Melakukan sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi (pencegahan KKN dan gratifikasi)								
Potensi Risiko	Mitigasi															
Penyalahgunaan wewenang	Menerapkan whistle blowing system (WBS) untuk pelaporan pelanggaran															
Gratifikasi dan KKN	Melakukan sosialisasi dan pelatihan anti-korupsi (pencegahan KKN dan gratifikasi)															
Catatan																

4. Manual Indikator 4 :

Program	HA – Dukungan Manajemen
Sasaran Kegiatan	SK 4 – Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Definisi Sasaran Kegiatan	Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
Indikator Kinerja Kegiatan	IKK 5 – Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Definisi Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi : Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Formula : Instrumen pengukuran nilai IKPA berdasarkan beberapa aspek seperti Realisasi Anggaran, Deviasi Halaman III DIPA, Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyampaian LPJ, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SPM, serta Capaian Output. Perhitungan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK 62 tahun 2023 1. 95% ≤ IKPA ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik 2. 89% ≤ IKPA < 95% dikategorikan Baik 3. 70% ≤ IKPA < 89% dikategorikan Cukup 4. IKPA < 70% dikategorikan Kurang Tujuan: Mendapatkan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan seberapa tertib, efisien, efektif, dan akuntabel suatu satuan kerja dalam mengelola keuangan
Satuan	Nilai
Target	2025: 91,00 2026: 92,80 2027: 92,85 2028: 92,90 2029: 93,00
Link dengan RPJMN	Ya/Tidak
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Unit Organisasi Lain yang Terlibat	-

Dukungan Indikator Kinerja Program	-											
Jenis Aspek Target	☐ Kuantitas/ Output ☒ Kualitas/Mutu ☐ Waktu ☐ Biaya											
Tingkat Kendali	☐ Low ☒ Moderate ☐ High											
Tingkat Validitas	☒ Activity ☐ Proxy ☐ Exact											
Jenis cascading IKU	☒ Cascading Peta ☐ Cascading Non Peta ☐ Non Cascading											
Metode Cascading	☐ Adopsi Langsung ☐ Dipersempit ☐ Komponen Pembentuk ☒ Tidak Diturunkan (Buat Baru)											
Polarisasi	☒ Maximize ☐ Minimize ☐ Stabilize											
Unit/ Pihak Penyedia Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian											
Sumber Data	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian											
Jenis Perhitungan Data	☐ Akumulasi ☐ Rata – rata ☒ Nilai Posisi Akhir											
Periode Pelaporan	☐ Bulanan ☐ Triwulan ☐ Semesteran ☒ Tahunan											
Mitigasi Risiko	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Potensi Risiko</th> <th>Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keterlambatan pengadaan barang/jasa</td> <td>Memulai proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran</td> </tr> <tr> <td>Penyimpangan rencana dan realisasi anggaran</td> <td>Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Potensi Risiko	Mitigasi	Keterlambatan pengadaan barang/jasa	Memulai proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran	Penyimpangan rencana dan realisasi anggaran	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan				
Potensi Risiko	Mitigasi											
Keterlambatan pengadaan barang/jasa	Memulai proses pengadaan barang dan jasa di awal tahun anggaran											
Penyimpangan rencana dan realisasi anggaran	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan											

Catatan		

Lampiran 11. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Satker : 237242 Saspeki Drogen : DESEMBER

No	Kode KPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir Total(Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	023	018	237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	Nilai	100.00	92.94	96.53	100.00	100.00	98.35	100.00	98.08	100%	0.00	98.08	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.94	19.31	10.00	10.00	9.84	25.00					
					Nilai Aspek	96.47		96.72				100.00					

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 04-01-26 05:45:47 dth : F01809

Lampiran 12. SK Tim Penyusun LAKIN BBPM SDLP Tahun 2025

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12, CIMANGGU, BOGOR 16114 TELEPON: (0251) 8323011 – 8323012, FAKSIMILI: (0251) 8311256 WEBSITE: sdlahan.bmp.pertanian.go.id
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN Nomor: 1626/OT.050/H.10/06/2025	
Tentang	
TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA (LAKIN) PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN,	
Menimbang	a. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dapat berjalan tertib, lancar dan akuntabel, perlu ditetapkan Tim Pelaksana Laporan Kinerja (LAKIN); b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Laporan Kinerja (LAKIN) pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4400); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2025.
- KEDUA : Segala Biaya dan Honorarium yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana LAKIN dibebankan pada DIPA 2025.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim mengacu kepada Pedoman Umum LAKIN Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian sebagai berikut :
1. Tim LAKIN mengumpulkan data untuk bahan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 2. Tim LAKIN bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan LAKIN di Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 3. Tim LAKIN bertanggung jawab melaporkan LAKIN di Lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ASDIANTOY
NIP 197801012002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
 Nomor : 1626/OT.050/H.10/06/2025
 Tanggal : 13 Juni 2025

**TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA (LAKIN)
 PADA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN
 PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Asdianto, S.P.,M.T	Pengarah	Kepala Balai Besar
2.	Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc	Penanggung Jawab	Ketua Kelompok Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian
3.	Ratri Ariani, S.P	Ketua	Ketua Tim Kerja Evaluasi
4.	Catur Nengsusmoyo, S.Kom	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Program
5.	Setiyo Purwanto, S.P., M.Sc	Anggota	Ketua Tim Kerja Perakitan dan Perkayasa
6.	Agus Sudiana	Anggota	Tim Kerja Program
7.	Mufti Wirahadinata, A.Md	Anggota	Tim Kerja Program
8.	Lady Hafidaty Rahma Kautsar, S.Si., M.Si	Anggota	Tim Kerja Program
9.	Adib Hasanawi, S.Si., M.T	Anggota	Tim Kerja Program
10.	Marlina, S.P	Anggota	Tim Kerja Program
11.	Fransiscus Benhardi Wastuwidya, S.T.P., M.T	Anggota	Tim Kerja Evaluasi
12.	Filan Hidayah, A.Md.P	Anggota	Tim Kerja Evaluasi
13.	Najla Husnul Khotimah, A.Md.Si	Anggota	Tim Kerja Evaluasi
14.	Tulus Arizon Pratama Simanullang, A.Md	Anggota	Tim Kerja Evaluasi

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



ASDIANTO

NIP. 197801012002121006

Lampiran 13. SK Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBK Lingkup BRMP

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 78 PSM TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204 WEBSITE: www.bmp.pertanian.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025	
TENTANG	
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,	
Menimbang	: a bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Penguatan Pengawasan; dan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
- a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
 - c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

4

- KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,



FADURY DJUFERY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

7

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025



KEPALA BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN,

RADJY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 14. SOP Penyusunan Laporan Kinerja BBPM SDLP

 BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN TIM KERJA PROGRAM DAN EVALUASI KELOMPOK PROGRAM DAN PERAKITAN TEKNOLOGI	Nomor SOP	B-2982/OT.080/H.10/10/2025
	Tgl. Pembuatan	08 Agustus 2024
	Tgl. Revisi	16 Oktober 2025
	Tgl. Efektif	20 Oktober 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian Asdinata S.P., M.T. NIP. 507801012002121006
	Nama SOP	Penyusunan LAKIN (Laporan Kinerja) BRMP SDLP

Dasar hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Penerimaan Negara Bukan Pajak 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami mekanisme perencanaan kegiatan pengujian standar Instrumen sumberdaya lahan pertanian 2. Memahami Renstra BRMP SDLP 3. Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BRMP SDLP 4. Memahami prinsip-prinsip penyusunan LAKIN 5. Memahami pengukuran kinerja 6. Memahami substansi kegiatan yang dilaksanakan di BRMP SDLP 7. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat
--	--

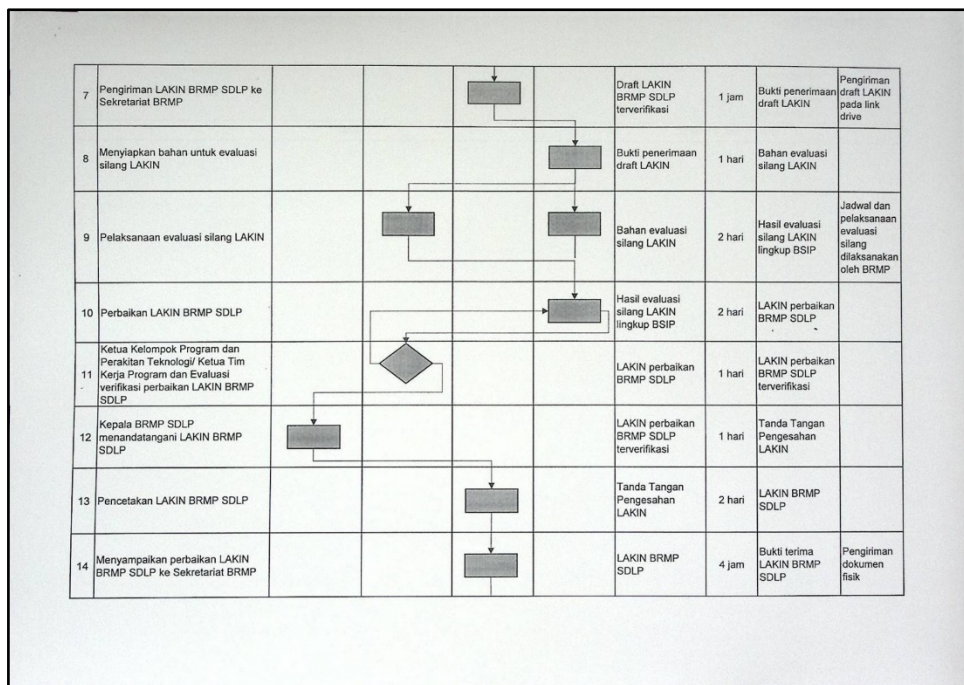
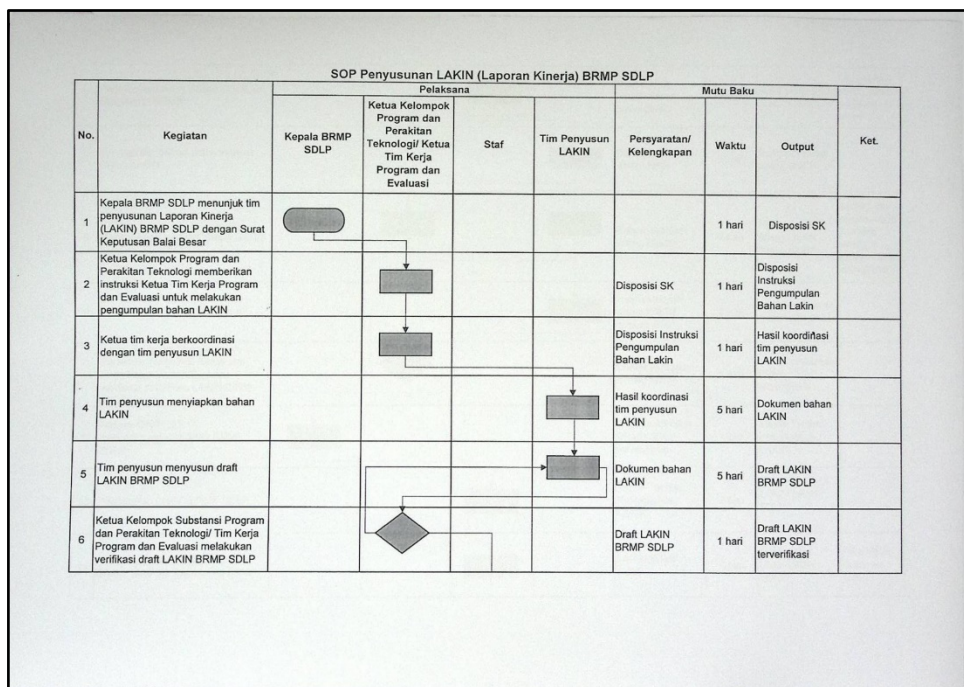
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 13. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 14. Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 15. Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional 16. Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 17. Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 18. Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 19. Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	
---	--

Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Anggaran dan Program Kegiatan BRMP SDLP 2. SOP Pelaksanaan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Internal 3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan	
--	--

Peringatan : Apabila LAKIN BRMP SDLP terlambat disusun akan berpengaruh terhadap penilaian implementasi SAKIP dan berakibat terlamatnya penyusunan LAKIN BRMP	
---	--

Peralatan / Perlengkapan : 1. Renstra BRMP SDLP 2. DIPA dan POK BRMP SDLP tahun berjalan 3. Dokumen PK (Perjanjian Kinerja) BRMP SDLP 4. Laporan akhir kegiatan 5. Laporan realisasi keuangan 6. Komputer dan printer 7. Jaringan internet 8. ATK	
---	--

Pencatatan dan Pendataan : 1. Sistematis laporan sudah ditentukan 2. Formulir laporan 3. Laporan kemajuan kegiatan pengujian standar instrumen sumberdaya lahan pertanian	
--	--





15	Ansip LAKIN BRMP SDLP				Bukti terima LAKIN BRMP SDLP	1 jam	LAKIN BRMP SDLP dan Bukti Terima LAKIN BRMP SDLP	
Total					23 Hari 6 Jam 0 Menit			

Lampiran 15. Rencana Aksi UK/UPT Lingkup BBPM SDLP

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025 BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN									
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN (SS/SP/SK)	KODE	IKSS / IKSP/RENCANA AKSI	PAGU	TARGET	SATUAN	TARGET PROGRESS(%)			
						TW1	TW2	TW3	TW4
SS02	Komoditas Pertanian Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing	IKSS0202	02. Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	100,00	%				
SP01	Meningkatnya sertifikasi Usaha/tani Nasional	IKSP0101	Persentase usaha tani berbadan hukum yang tersertifikasi	100,00	%	0	10	70	100
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Persentase produk sumberdaya lahan yang tersertifikasi (%)	48.460.000	100	%	0	10	70
		7911.CAG.104.051.A	Sarana Laboratorium SDLP Modern	48.460.000	2	Unit	0	10	70
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu tanah dan pupuk modern (Jumlah Pengujian)	1.762.139.000	3527	Produk	19	38,00	64,00
		7911.BJA.107.051.A	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Tanah, Air, Tanaman, Pembenahan Tanah dan Pupuk Terstandar	1.599.624.000	3522	Produk	31	63	86
		7911.BJA.107.051.B	Penyelenggaraan Uji Profesi/Laboratorium Pengelolaan IP2SIP	48.515.000	3	Produk	0	0	30
		7911.BJA.107.051.C	Jumlah konsep SNI tanah dan pupuk yang disusun (Jumlah RSNi)	114.000.000	2	Produk	25	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI tanah dan pupuk yang disusun (Jumlah RSNi)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian tanah dan pupuk (Indeks)		3,2	Indeks	25	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu lingkungan pertanian modern (Jumlah Pengujian)	566.275.000	730	Produk	15	50	75
		6916.BJA.107.052.A	Pengelolaan IP2SIP	82.194.000	2	Produk	15	50	75
		6916.BJA.107.052.B	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Lingkungan Pertanian	424.077.000	728	Produk	15	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI lingkungan pertanian yang disusun (Jumlah RSNi)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian lingkungan pertanian (Indeks)		3,2	Indeks	25	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu pertanian lahan rawa modern (Jumlah Pengujian)	127.632.000	415	Produk	15	50	75
		7911.BJA.107.051.A	Pengelolaan Laboratorium Pengujian Pertanian Lahan Rawa	100.000.000	410	Produk	15	50	75
		7911.BJA.107.051.B	Pengelolaan IP2SIP	27.632.000	5	Produk	15	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI sumberdaya lahan pertanian yang disusun (Jumlah RSNi)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian (Indeks)		3,2	Indeks	25	50	75

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian									
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK1	Jumlah pengujian mutu sumberdaya lahan pertanian modern (Jumlah Pengujian)	10.571	2	Unit	15	50	75
		7911.CAG.104.051.A	Pengadaan Alat Laboratorium	10.571	2	Unit	15	50	75
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK2	Jumlah konsep SNI sumberdaya lahan pertanian yang disusun (Jumlah RSNi)						
SK01	Meningkatnya kualitas produk sumberdaya lahan pertanian	IKK3	Indeks kepuasan layanan pengujian sumberdaya lahan pertanian (Indeks)						
SS01	Komoditas Pertanian yang Tersedia	IKSS0106	Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	90,56	%				
SP02	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyulap PSP, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	IKSP0202	Persentase pelekut usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyulap PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	20,33	%	0	0	50	100
SS04	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKSS0401	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	80,20	%				
SP03	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	IKSP0303	Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	78,51	%	0	0	50	100
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian									
SK03	Torujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKWBPM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya lahan pertanian (Nilai)	12.309.339.000	83,35	Nilai	25	50	75
		6918.AEA.101.051.A	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.135.000.000	1	Kegiatan	20	50	75
		6918.EBA.966.051.A	Layanan BMN	10.000.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.966.051.A	Layanan Humas	60.000.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.966.051.B	Pengelolaan Informasi Publik	14.000.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.962.051.E	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kemampuan SDM	84.000.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.962.051.F	Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan dan Kerumahainggaan	120.500.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.818.219.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.994.002.A	Kebijakan Sehat-Hari Pertanian	2.424.794.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	1.447.200.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Kantor	2.483.586.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	635.540.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	64.500.000	1	Layanan	20	50	75
		6918.EBA.953.051.B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko	12.000.000	1	Layanan	20	50	75
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk									
SK03	Torujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKWBPM pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (Nilai)	10.909.127.000	83,35	Nilai	25	50	75

		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Standar Pengelolaan Tanah dan Hara Mendukung Swasembada Pangan	835.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		6918.EBA.966.051.A	Sistem Akuntansi Pemerintah/SAIBA/SHAKMBM	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.968.051.A	Pengelolaan Informasi Publik	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.968.051.B	Pelayanan Hubungan Masyarakat	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.F	Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu	38.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Sater	55.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	5.531.327.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.871.420.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	448.440.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan perkantoran	1.835.570.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	226.370.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	13.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKWBSP pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (Nilai)	8.190.356.000	83,35	Nilai	25	50	75	100
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	910.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		6918.EBA.966.051.A	Operasional Pengelolaan Barang Milik Negara	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.968.051.A	Layanan Hubungan Masyarakat	26.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.968.051.B	Pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi	29.500.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.D	Pengelolaan Kepegawaian dan Kelembagaan	70.500.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Sinkronisasi kegiatan dan Koordinasi Informasi Standar Instrumen/Lingkungan Pertanian	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.796.028.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	976.925.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	402.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan perkantoran	1.215.284.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	619.319.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	21.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	8.800.000	1	Layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKWBSP pada Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa (Nilai)	7.495.539.000	83,35	Nilai	25	50	75	100
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	835.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		6918.EBA.966.051.A	Operasional Pengelolaan Barang Milik Negara	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.962.051.B	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	15.000.000	1	Dokumen	25	50	75	100
		6918.EBO.962.051.C	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	15.000.000	1	Dokumen	25	50	75	100
		6918.EBO.962.051.D	Pengelolaan Informasi Publik	25.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.962.051.E	Pengelolaan Hubungan Masyarakat	15.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.962.051.F	Pengelolaan Kepegawaian	30.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.962.051.G	Sinkronisasi Kegiatan dan Koordinasi Informasi Standardisasi Instrumen Pertanian	35.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Gaji dan Tunjangan	3.014.379.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.599.140.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	308.985.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan perkantoran	1.058.153.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	444.882.000	1	Layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBKWBSP pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (Nilai)	7.394.484.000	81,21	Nilai	25	50	75	100
		6918.AEA.101.051.A	Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.035.000.000	1	Kegiatan	25	50	75	100
		6918.EBA.966.052.A	Pengelolaan, Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium Agroklimat	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.968.051.A	Pelayanan Humas	25.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.968.051.B	Pengelolaan Informasi Publik	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.F	Koordinasi, Sinkronisasi Kelembagaan Sater dan Rumah Tangga	51.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.G	Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Manajemen Mutu	22.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.827.284.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.A	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1.332.550.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.B	Langganan daya dan jasa	465.720.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.C	Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor	1.113.735.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.994.002.D	Operasional Sater	467.195.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.953.051.A	Monitoring, Evaluasi dan Unit Pengelola Gratifikasi	25.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBO.953.051.B	Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Indeks	10.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
SS04	Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, Efisien, dan Akuntabel	IKSS0402	Nilai KPA Kementerian Pertanian		92,74	Nilai				
SP04	Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	IKSP0404	Nilai KPA Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		85,60	Nilai				
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumberdaya Lahan Pertanian (Nilai)	145.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	77.500.000	1	Layanan	20	50	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan dan SAP	67.500.000	1	Layanan	20	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (Nilai)	49.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	28.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan	21.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian										

SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (Nilai)	29.200.000	87	Nilai	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	22.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.E	Operasional Pengelolaan Keuangan	7.200.000	1	Layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa (Nilai)	65.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	35.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan	30.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian										
SK03	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	IKK4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian (Nilai)	57.000.000	87	Nilai	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.A	Penyusunan Program dan Anggaran	35.000.000	1	Layanan	25	50	75	100
		6918.EBA.962.051.H	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan	22.000.000	1	Layanan	25	50	75	100

Kepala Balai



Asdianto, S.P., M.T.
NIP 197801012002121006



BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
JL. TENTARA PELAJAR NO. 12, KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114
TELEPON: (0251) 8323011- 8323012, FAXSIMIL:(0251) 8311256
WEBSITE: WWW. SDLP. BRMP. PERTANIAN. GO. ID E- MAIL: BRMP. SDLP@ PERTANIAN. GO. ID